



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah penulisan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini dapat terselesaikan. Laporan ini berisikan uraian mengenai kinerja sasaran dan indikator sasaran, akuntabilitas kinerja yang meliputi uraian hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Pangan an di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Liwa, 09 Februari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat



Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661226 199203 1 001

IKHTISAR EKSLUSIF

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dimana pada tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 salah satunya memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal.

Untuk mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan sasaran beserta indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan, dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebanyak 1 sasaran, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator. Untuk mencapai kinerja sasaran tersebut, terdapat 5 program 13 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan menunjukkan bahwa persentase pencapaian sasaran telah mencapai rata – rata lebih dari 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025 telah baik dan terukur. Secara keseluruhan anggaran program dan kegiatan belanja langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.977.209.291,- dan teralisasi sebesar Rp 2.886.036.543,- atau 96,94%.

Berdasarkan analisis capaian kinerja maka capaian kinerja sasaran secara umum sudah baik. Pencapaian kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 pada setiap indikator adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Tujuan yaitu Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2025 dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 77,15% dari target 72,90% menandakan kondisi pangan di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek akses, dan aspek pemanfaatan pangan. Hal ini ditandai dengan Skor PPH ketersediaan sebesar 99,13 Point, skor PPH konsumsi sebesar 87 Point.

Secara kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai Tujuan yaitu Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 77,15% Kalau dibandingkan dengan target nasional 73% maka Kabupaten Lampung Barat sudah melampaui dari target tersebut. Dan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam peringkat 5 besar di Propinsi Lampung dari 15 Kabupaten/Kota.

- b. Penanganan daerah rawan pangan dengan indikator penurunan daerah rawan pangan, untuk Tahun 2025 dengan target 3 pekon tercapai sesuai target.

Analisis faktor pendukung keberhasilan

Terdapat beberapa indikator faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Ada tiga indikator keberhasilan yaitu indikator pemanfaatan Pangan, Ketersediaan, dan Akses Pangan.

1. Pemanfaatan Pangan

Dari aspek pemanfaatan pangan secara umum konsumsi energi di Kabupaten Lampung Barat mencapai 2,058,57 kkal/kapita/hari. Secara kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor Pola Pangan Harapan 88,72 point dan komposisinya dari seluruh kelompok pangan. Dari aspek ketersediaan.

2. Ketersediaan

Secara aspek Ketersediaan, Ketersediaan Energi di Kabupaten Lampung Barat sudah baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan Ketersediaan Energi sebesar 3.933 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.400 kalori/kapita/hari, sedangkan ketersediaan protein sebesar 95,74 gram/kalori/hari dari angka yang dianjurkan yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 66,24 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yaitu sebesar 48,88 gram/kapita/hari.

3. Akses Pangan

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator aspek akses terhadap pangan, dapat dilihat bahwa skor komposit dari indikator-indikator akses terhadap pangan di kabupaten Lampung Barat dalam kategori aman. Pada tingkat kecamatan yang berada pada kondisi aman terdapat 15 kecamatan, berdasarkan hasil analisa pada 15 kecamatan kecenderungan harga pangan pokok stabil.

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan instansi teknis dalam upaya peningkatan produksi komoditas yang mendukung energi dan protein nabati dan hewani;
2. Sosialisasi dan promosi terkait dengan ketersediaan energi dan protein di tingkat rumah tangga;
3. Melengkapi sarana dan prasarana petugas pemantau harga;
4. Koordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas Infokom untuk mengadakan portal perkembangan harga pangan pada situs resmi atau portal Pemkab Lampung Barat sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan harga setiap hari;
5. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
6. Meningkatkan pembinaan, publikasi dan sosialisasi di berbagai media.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 20 Januari 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661226 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Peran Strategis Perangkat Daerah.....	5
E. Isu Strategis	5

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	9
B. Program dan Kegiatan.....	15
C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	17
D. Target Kinerja Tahun 2025	23

BAB III. KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia	26
B. Analisis Sarana dan Prasarana	28
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.....	31

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja	42
B. Perbandingan Kinerja	74
C. Realisasi Anggaran.....	77
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	78

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan Umum	80
B. Faktor Pendukung Keberhasilan	82
C. Permasalahan	83
D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi	11
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	17
Tabel 2.4. Rincian pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025	21
Tabel 2.5. Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan yang dilaksanakan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	23
Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	26
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Menurut Status	27
Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan	27
Tabel 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	27
Tabel 3.5. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.....	29
Tabel 4.1. Capaian Indikator kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	42
Tabel 4.2. Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 dan perbandingan dengan tahun 2021 s.d 2024.....	43
Tabel 4.3. Perkembangan harga pangan strategis tahun 2025.....	66
Tabel 4.4. Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan Tahun 2025	72
Tabel 4.5. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2024	74
Tabel 4.6. Realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025	77
Tabel 5.1. Capaian sasaran, kinerja dan capaian Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan LB	4
Gambar 4.1. Peta proses bisnis Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	48
Gambar 4.2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	48
Gambar 4.3 Peta proses bisnis Program Kerawanan Pangan	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (Ketersedian).....	62
Grafik 4.2. Perkembangan Ketersediaan Energi dan protein Penduduk Lampung Tahun 2014-2025 (Kkal/kapita/hari).	63
Grafik 4.3. Perkembangan harga gabah dan beras di tingkat petani	64
Grafik 4.4. Perkembangan Tingkat Kestabilan Harga Pangan Pokok	70
Grafik 4.5. Grafik perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2025	71
Grafik 4.6. Perkembangan konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2025	73
Grafik 4.7. Perkembangan rata-rata konsumsi protein (gram/kap/hr) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2025	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan dan sasaran daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

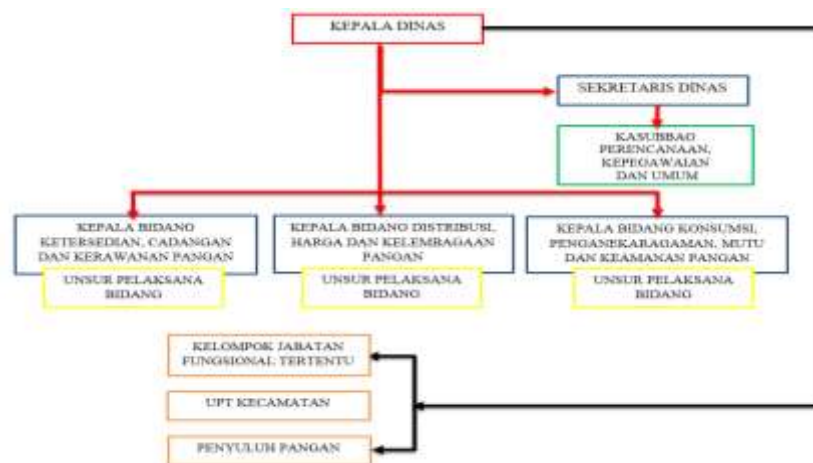
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Kepegawain
 - b. Analis Keuangan Pusat dan daerah.
3. Bidang Ketersedian, Cadangan dan Kerawanan Pangan
 - a. Analis Ketahanan Pangan Sub Kordinasi Ketersedian Pangan;
 - b. Analis Ketahanan Pangan Sub Kordinasi Cadangan Pangan; dan
 - c. Analis Ketahanan Pangan Sub Kordinasi Kerawanan
 4. Bidang Distribusi, Harga, dan Kelembagaan Pangan membawahi:
 - a. Analis Ketahanan Pangan Sub Kordinasi Distribusi Pangan;
 - b. Analis Ketahanan Pangan Sub Kordinasi Harga Pangan; dan
 - c. Analis Ketahanan Pangan Sub Kordinasi Kelembagaan Pangan.
 5. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan membawahi:
 - a. Analis Ketahanan Pangan Sub Kordinasi Konsumsi Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Sub Kordinasi Penganekaragaman Pangan; dan
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Sub Kordinasi Mutu dan Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh Ir. NATA DJUDIN AMRAN, M.M yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi.

E. Isu Strategis

1. Penyusunan Regulasi

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Noor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kabupaten.

2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan

Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Lampung Barat

secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Lampung Barat. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor. Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

3. Penguatan Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

4. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan

Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

5. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Lampung Barat masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat

diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

6. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

7. Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar

juga perlu untuk ditangani. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

8. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena: (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan

dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis

melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan RPD : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Sasaran RPD : Menurunnya Tingkat Kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	1. Peningkatan Kapasitas produksi domestik;	1. Menjamin ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
		2. Pelestarian sumber daya lahan dan air;	2. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan dalam pemupukan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas;
		3. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	3. Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.

		4. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	4. Meningkatkan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin
		5. Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan;	5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan sarana dan prasarana distribusi dan menghilangkan hambatan distribusi pangan antar daerah
		6. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan;	6. Meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dan halal dikonsumsi dan bergizi seimbang
		7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin;	7. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan;
		8. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal;	8. Mengembangkan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A;
		9. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang;	9. Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi;

		10. Pengembangan materi dan cara ajar diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal;	10. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang;
		11. pengembangan aspek kuliner dan daya terima konsumen;	11. Mengutamakan upaya preventif, promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral);
		12. Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective;	12. Memprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya;
		13. Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin;	13. Meningkatkan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga terjamin adanya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar sektor di pusat dan daerah, khususnya dengan sektor kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, agama, serta pemerintahan daerah;

		14. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan;	14. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan;
		15. Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam promosi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan penapisan serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk;	15. Melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan
		16. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga - lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi serta pemerintahan daerah untuk promosi keluarga sadar gizi, pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk secara dini dan terpadu;	16. Meningkatkan kesadaran produsen, importir, distributor dan ritel terhadap keamanan pangan;
		17. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan di tingkat rumah tangga, industri rumah tangga dan UKM serta importir, distributor dan ritel serta pemahaman tentang implikasi hukum pelanggaran peraturan keamanan pangan yang berlaku;	17. Meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan;
		18. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;	18. Mengembangkan teknologi pengawet dan pewarna makanan yang aman

			dan tidak memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen makanan dan jajanan.
		19. Peningkatan kesadaran dan perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan	19. Mengembangkan teknologi pengawet dan pewarna makanan yang aman dan tidak memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen makanan dan jajanan.

B. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang pangan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan yaitu:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)
02.09.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
02.09.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
02.09.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun

02.09.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
02.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
02.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum
02.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan
02.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
02.09.02.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Angka Ketersedian Energi dan Angka Ketersedian Protein
02.09.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kemandirian pangan yang tersedia
02..09.03	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi
02..09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Koefisien variasi Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsi dan perbandingan harga gabah di tingkat petani
02..09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten
02..09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi	1. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi 2. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein
02..09.03.3.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten
02.09.04.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan
02.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun
02.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan
02..09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan

02..09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan
02..09.05.3.02	Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro

C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka pendanaan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Ketahanan melalui program dan kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Rawan Pangan	%	11,02

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Rawan Pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Desa Rawan Prioritas 1,2,3}}{\text{Jumlah Total Desa}} \times 100$ P1 = Desa Prioritas 1 Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi/sangat rentan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek akses pangan, akses pemanfaatan	Dinas Ketahanan Pangan dan BPS	14,70	12,50	11,02	9,55	Persentase Daerah Rawan pangan adalah indikator atau tolak ukur kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi Pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya. Indikator yang digunakan dalam penghitungan persentase daerah rawan

				pangan. P2 = Desa Prioritas 2 Prioritas 2 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang tinggi/rentan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek akses pangan, akses pemanfaatan pangan. P3 = Desa Prioritas 3 Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi/agak rentan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek akses pangan, akses pemanfaatan pangan.						pangan sebagai berikut : 1. Aspek Ketersediaan Pangan Indikatornya adalah Rasio luas baku lahan Pertanian dibandingkan jumlah penduduk dan Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga 2. Aspek Akses terhadap Pangan Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa dan Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara. 3. Aspek Pemanfaatan Pangan
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

										Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa dan Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa. Contoh perhitungan, daerah A memiliki desa sebanyak 136 desa, dengan prioritas desa rawan pangan pada prioritas 1 (0 desa), Prioritas 2 (1 desa), dan prioritas 3 (19 desa). Maka persentase daerah rawan pangan pada tahun tersebut adalah : $\frac{20 \text{ Desa}}{136 \text{ Desa}} \times 100\% = 14,70\%$
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026 merupakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat yang merupakan program prioritas Kabupaten mendukung pencapaian sasaran RPD. Pada Tahun 2025 terjadi pergeseran dan perubahan APBD pada Dinas Ketahanan Pangan, namun adanya pergeseran dan perubahan pada APBD tersebut tidak merubah target kinerja eselon II yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rincian pendanaan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rincian pendanaan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Pagu Usulan	Pagu Murni	Pagu Pergeseran	Pagu Perubahan
02.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.694.500	2.738.406.925	2.608.749.125	2.365.076.491
02.09.01 .2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.000.000	31.194.400	7.975.000	24.607.000
02.09.01 .2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	2.535.500.000	2.381.491.425	2.378.466.425	2.096.571.791
02.09.01 .2.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000000	2.110.800	1.014.000	1.014.000
02.09.01 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000	11.967.000	1.355.000	1.355.000
02.09.01 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.000.000	121.510.500	75.916.500	95.106.500
02.09.01 .2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	-	-	-
02.09.01 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000	66.630.400	66.630.400	69.030.400
02.09.01 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	213.000.000	123.502.400	77.352.400	77.352.400

	Pemerintahan Daerah				
02.09.02 .	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	310.000.000	81.297.000	64.689.500	74.893.000
02.09.02 .2.01	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	310.000.000	81.297.000	64.689.500	74.893.000
02..09.0 3	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.610.000	674.102.000	447.248.600	501.251.800
02..09.0 3.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	560.000.000	241.440.000	173.236.600	207.302.800
02..09.0 3.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	628.565.000	258.506.000	174.098.000	174.098.000
02..09.0 3.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi	777.884.500	174.156.000	99.914.000	119.851.000
02.09.04 .	Program Penanganan Kerawanan Pangan	900.000.000	31.683.500	12.493.000	12.493.000
02.09.04 .2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	150.000.000	31.683.500	12.493.000	12.493.000
02.09.04 .2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000	-	-	-
02.09.05 .	Program Pengawasan Keamanan Pangan	330.000.000	42.337.200	23.495.000	23.495.000
02.09.05 .2.01	Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000	42.337.200	23.495.000	23.495.000

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2026

D. Target Kinerja Tahun 2025

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disusun dalam satu dokumen tersendiri dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 Dalam RKT tersebut telah disusun sasaran dan Target Kinerja OPD tahun 2025 beserta indikator kinerjanya. Dapat dilihat dalam tabel :

Tabel. 2.5

Sasaran Program dan kegiatan Dinas Ketahanan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Anggaran	
				Tahun 2025	
				Target	Rp
Meningkatnya Ketahanan Pangan			Index Ketahanan Pangan	72.90 %	2.977.209.291
	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan		% Daerah Rawan Pangan	11,02 %	2.977.209.291
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	80 %	2.365.076.491
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	40 Dokumen	24.607.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	28 Dokumen	2.096.571.791
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.014.000
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.355.000

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	32	Paket	95.106.500
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32	Laporan	69.030.400
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24	Unit	77.352.400
		PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein	2400 dan 69	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	74.893.000
		KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Infrastruktur Kemendirian pangan yang tersedia	5	Unit	74.893.000
		PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	84,10	Point	501.251.800
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Koefisien variasi Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsi dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	CV < 10	%	207.302.800
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	25	Ton	174.098.000
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi	1. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi 2. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein	2150 dan 57	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	119.851.000

		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	12.493.000
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	1 Peta	12.493.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	> 80 %	23.495.000
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	2 Jenis	23.495.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur sejauh mana tercapainya target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan data yang relevan dengan setiap indikator kinerja sasaran. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur merupakan media untuk mengetahui keberhasilan/ kegagalan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.

Persentase capaian kinerja dilakukan dengan membagi realisasi kinerja dengan target dengan rumus sebagai berikut:

- Kondisi 1:**

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja semakin tinggi, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- Kondisi 2:**

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja semakin rendah maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai. Berikut gambaran tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat:

Tabel 3.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Uraian	Orang					Jumlah
		SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	
1.	Kepala Dinas					1	1
2.	Sekretariat		3		7	1	11
3.	Bidang Ketersedian, Cadangan dan Kerawanan Pangan		2	1	2	1	6
4.	Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaaan Pangan		2	1	5	0	8
5.	Bidang Konsumsi, Penganekaragaman mutu dan Keamanan Pangan		1		5	1	7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Tabel 3.2.
Jumlah Pegawai Menurut Status

No	Uraian	Status Kepegawaian (orang)			
		PNS	PPPK	P3K Paruh Waktu	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1
2.	Sekretariat	6	2	3	11
3.	Bidang Ketersedian, Cadangan dan Kerawanan Pangan	3	-	3	6
4.	Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaaan Pangan	5	-	3	8
5.	Bidang Konsumsi, Penganekaragaman mutu dan Keamanan Pangan	5	-	2	7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Tabel 3.3.
Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan

No	Uraian	Golongan(Orang)				PPPK	PPPK PW	Jumlah
		I	II	III	IV			
1.	Kepala Dinas				1			1
2.	Sekretariat			5	1	2	3	11
3.	Bidang Ketersedian, Cadangan dan Kerawanan Pangan		1	1	1	0	3	6
4.	Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaaan Pangan			4	1	0	3	8
5.	Bidang Konsumsi, Penganekaragaman mutu dan Keamanan Pangan			4	1		2	7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

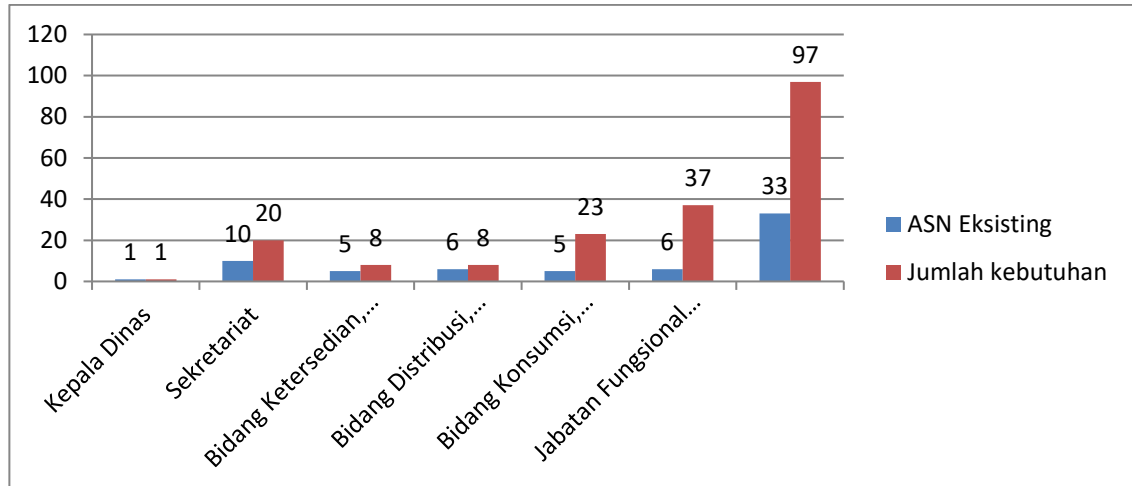
Tabel 3.4.
Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan

No	Uraian	ESELON			JFT	JFU	P3K	P3K PW	JUMLAH
		II	III	IV					
1.	Kepala Dinas	1							1
2.	Sekretariat		1	1	1	3	2	3	11
3.	Bidang Ketersedian, Cadangan dan Kerawanan Pangan		1		1	1		2	6
4.	Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaaan Pangan		1		2	2		3	8
5.	Bidang Konsumsi, Penganekaragaman mutu dan Keamanan Pangan		1		2	2		2	7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pada gambar diatas terlihat bahwa kinerja yang seharusnya dikerjakan oleh 97 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan, saat ini kondisinya ditangani oleh 33 Aparatur Sipil Negara pada Dinas Ketahanan Pangan.

Jumlah ini belum cukup proposional dikarenakan beban kerja yang cukup banyak, oleh karena itu diharapkan kedepannya ada penambahan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan sehingga dapat membuat proposional antara beban pekerjaan dengan ketersediaan SDM yang ada.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Barang	Ukuran / CC	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah	Unit	Kondisi
1		3	4	5	6	7
I	Kendaraan					
1	Mini Bus	Toyota Rush	2012	1 unit	DKP	Baik
2	Mini Bus	Daihatsu Taruna	2000	1 Unit	DKP	Baik
3	Motor	Honda Blade CW	2012	2 bh	DKP	Baik
4	Motor	Yamaha Vega	2014	1 bh	DKP	Baik
5	Motor	SUZUKI FL125RCM D	2013	2Bh	DKP	Baik
6	Motor	Yamaha MX 115	2016	10 Bh	DKP	Baik
II	Alat Kantor dan Rumah Tangga					
1	PC set Pentium D30 Ghz	-	2008	1	DKP	Rusak
2	Mesin tik	Olympus Type SM 18	2008	2	DKP	Rusak
3	Filling Cabinet	Brother 4 Laci	2008	6	DKP	Baik
4	Lemari Arsip	-	2008	2	DKP	Baik
5	Meja 1 Biro	-	2008	1	DKP	Baik
6	Meja 1/2 Biro	-	2008	16	DKP	Baik
7	Kursi 1 Biro	-	2008	1	DKP	Baik
8	Kursi 1/2 Biro	-	2008	5	DKP	Rusak
9	PC Set Intel Core 2 Duo 2,5 Ghz	-	2008	1	DKP	Rusak
10	Kursi Lipat	-	2008	16	DKP	Rusak
11	Wireless	Black spider	2008	1	DKP	Rusak
12	Mesin Tik	Olivelti	2009	9	DKP	Rusak
13	Mesin Tik	Olivelti	2010	1	DKP	Rusak
14	Meja Kerja	-	2010	27	DKP	Baik
15	Kursi Kerja	-	2010	3	DKP	Baik
16	Laptop	Acer	2010	1	DKP	Baik
17	Gorden	-	2010	64	DKP	-
18	Komputer	-	2010	2	DKP	Baik
19	Brankas	Ichiban	2010	1	DKP	Baik
20	Printer	-	2010	2	DKP	Rusak

21	Meja 1 Biro	Active	2012	2	DKP	Baik
22	Meja 1/2 Biro	MT-001	2012	18	DKP	Baik
23	Kursi 1 Biro	Active	2012	2	DKP	Baik
24	Kursi Lipat	Chotose	2012	43	DKP	Rusak
25	Lemari Arsip	Super Furniture	2012	1	DKP	Baik
26	Lemari Arsip	Active	2012	17	DKP	Baik
27	Komputer	Intel	2012	1	DKP	Baik
28	Komputer Notebook	Toshiba	2012	1	DKP	Baik
29	Wireless	Martin Roland	2012	1	DKP	Rusak
30	Meja 1/2 Biro	-	2013	12	DKP	Baik
31	Kursi Lipat	Chitose	2013	12	DKP	Baik
32	Sofa	-	2013	1	DKP	Baik
33	Komputer Notebook	Toshiba	2013	1	DKP	Baik
34	Mesin Ketik	-	2008	2	DKP	Rusak
35	Filing Kabinet	-	2008	6	DKP	Baik
36	Komputer	-	2008	2	DKP	Rusak
37	Meja 1 Biro	-	2008	1	DKP	Baik
38	Meja ½	-	2008	24	DKP	Baik
39	Lemari Arsip	-	2008	2	DKP	Baik
40	Kursin1 Biro	-	2008	1	DKP	Baik
41	Kursi ½ Biro	-	2008	5	DKP	Baik
42	Kursi Lipat	-	2008	24	DKP	Rusak
43	Laptop	-	2009	1	DKP	Rusak
44	Brangkas	-	2009	1	DKP KKP	Baik
45	Komputer	-	2010	1	DKP KKP	Rusak
46	Mesin Ketik	-	2012	1	DKP KKP	Rusak
47	Komputer	-	2012	1	DKP KKP	Baik
48	Laptop	-	2012	1	DKP KKP	Baik
49	Komputer	-	2013	1	DKP KKP	Baik
50	Laptop	Asus	2022	1	DKP	Baik
51	Laptop	Asus Vivobook Go	2025	1	DKP	Baik
52	Laptop	Asus Vivobook Go	2025	1	DKP	Baik
53	Printer	Epson L3250	2025	1	DKP	Baik

III Alat Studio Komunikasi						
1	Faximile	Panasonic	2014	1	DKP	Rusak
2	Kamera Digital	Canon	2014	1	DKP	Rusak
3	Kamera Digital	Casio	2010	1	DKP	Rusak
4	Handycam	Sony	2010	1	DKP	Baik
5	Radio Rig	Kenwood TM-281A	2012	1	DKP	Rusak
6	Handy Talky	Motorola CP1660	2012	6	DKP	Rusak
7	Kamera Digital	Nikon D3100 18-55 VR Kit	2013	1	DKP	Rusak
8	Warles	Panasonic	2013	1	DKP	Baik
9	Faximile	Cannon	2012	1	DKP	Rusak
10	Proyektor	-	2008	1	DKP	Rusak
11	Kamera Digital	-	2013	1	DKP	Rusak
12	TV	Politron	2022	1	DKP	Baik
13	Camera Conference	Rexsus Alva II Pro	2022	1	DKP	Baik
15	LCD Projector/Infocus	Aces BSD-120 PV	2022	1	DKP	Baik
IV Alat Ukur						
1	GPS	Garmin Montana 650	2013	1	DKP	Baik

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun 2025 terdapat efesiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun 2025. Sehingga pada Tahun 2025 anggran Dinas ketahanan Pangan sebesar Rp. 2.977.209.291,- dari anggaran tersebut sebesar Rp. 2.093.723.791,- Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 861.885.500,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 21.600.000,-.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program,kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 5 program 13 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan Alokasi dana

Tahun 2025 Untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.977.209.291,- teralisasi Rp. 2.886.036.543,- atau 96,94%, (Belanja Pegawai Rp. 2.093.723.791,- teralisasi sebesar Rp. 2.023.084.052,- atau 96,92%, Belanja Barang dan Jasa Rp. 861.885.500,-. terealisasi Rp. 841.552.491,- atau 97,64%) sehingga terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 91.172.748,- atau 3,06%, walaupun secara anggaran terdapat efesiensi namun secara kinerja Dinas Ketahanan Pangan terealisasi dengan rata-rata 100%.

Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja di Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Target Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Semester 2 Tahun 2025				
						Realisasi kinerja		Realisasi Tingkat Capaian (%)	Realisasi Anggaran	Realisasi Tingkat Capaian (%)
	Bidang Pangan				2.977.209.291,-				2,886.036.543,-	96.94
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip	80	Point	2.365.076.491,-	80,16	Point	107,64	2.280.676.425,-	96
	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	40	Dokumen	24.607.000,-	40	Dokumen	100	24.351.000,-	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	19.189.000,-,-	11	Dokumen	100	18.933.000,-	99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1`	Dokumen	1.335.000,-	1`	Dokumen	100	1.335.000,-	100

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1	Dokumen	404.000,-	1	Dokumen	100	404.000,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	360.000,-	1	Dokumen	100	360.000,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1	Dokumen	227.000,-	1	Dokumen	100	227.000,-	100
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12	Dokumen	507.000,-	12	Dokumen	100	507.000,-	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	Dokumen	2.585.000,-	12	Dokumen	100	2.585.000,-	100
	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Yang disusun	28	Dokumen	2.096.571.791,-	32	Dokumen	114	2.025.932.052,-	97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya	22	Orang Bulan	2.093.723.791,-	22	Orang Bulan	100	2.023.084.052,-	97
	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1	Dokumen	1.285.000,-	1	Dokumen	100	1.285.000,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	2	Dokumen	549.000,-	2	Dokumen	100	549.000,-	100
	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah LaporanPrognosi	1	Dokumen	1.014.000,-	1	Dokumen	100	1.014.000,-	100

	Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	s Realisasi Anggaran								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	Dokumen	1.053.400,-	2	Dokumen	100	1.053.400,-	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik Daerah SKPD	1	Dokumen	505.000,-	1	Dokumen	100	505.000,-	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	548.400,-	1	Laporan	100	548.400,-	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatura yang mengikuti Pelatihan dan Peningkatan Disiplin Kkapasitas sumber daya Aparatur	12	Dokumen	1.355.000,-	12	Dokumen	100	1.355.000,-	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	1.355.000,-	12	Dokumen	100	1.355.000,-	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi perkantoran tepat waktu	32	Peket	95.106.500,-	32	Laporan	100	94.198.521,-	99

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	1	Paket	6.050.000,-	1	Paket	100	6.050.000,-	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	3	Paket	5.594.000,-	3	Paket	100	5.589.000,-	99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6.925.000,-	2	Paket	50	6.925.000,-	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Paket	10.080.000,-	1	Paket	100	10.080.000,-	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	12	Laporan	5.280.000,-	12	Laporan	100	5.280.000,-	100
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	39.577.000,-,-	12	Laporan	100	38.874.021,-	98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor	3	Paket	21.600.000,-,-	3	Paket	100	21.400.000,-	99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Kantor	32	Laporan	69.030.400,-	32	Laporan	100	59.627.350,-	86
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.500.000,-	12	Laporan	100	2.500.000,-	100
	Penyediaan jasa komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa	12	Laporan		12	Laporan	100		70

	sumberdaya air dan listrik	komunikasi sumberdaya air dan listrik			18.600.000,-				13.096.950,-	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	Laporan	47.930.400,-	12	Laporan	100	44.030.400,-	92
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	24	Unit	77.352.400,-	24	Unit	100	74.159.102,-	96
	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kedaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak atau Perizinannya	16	Unit	52.150.000,-	16	Unit	100	48.956.702,-	94
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit	5.190.000,-	3	Unit	100	5.190.000,-	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	20.012.400,-	5	Unit	100	20.012.400,-	100
2	Program Pengelolaan Sumberdaya ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah sumberdaya ekonomi pangan terhadap wilayah	2400 dan 69	Kkal/Kap/Hr dan gr/kap/hr	74.893.000,-	3.933 dan 95,74	Kkal/Kap/Hr dan gr/kap/hr	163,9 dan 138,8	74.654.500,-	99,68

	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur Kemandirian pangan yang tersedia	5	Unit	74.893.000,-	5	Unit	100	74.654.500,-	99,68
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Tersedia	5	Unit	43.675.000,-	5	Unit	100	43.675.000,-	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur Logistik	2	Laporan	31.218.000,-	2	Laporan	100	30.979.500,-	99
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,10	Point	501.251.800,-	88,72	Point	105,5	495.000.179,-	99
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka Satbilisasi Pasokan Harga Pangan	Koevisien Variasi harga Pangan Pokok (Beras) dan Perbandingan Harga Gabah Ditingkat Petani	10	CV ≤ 10%	207.302.800,-	10	CV ≤ 10%	100	202.046.875,-	97
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan	1	Laporan	155.000.000,-	1	Laporan	100	150.498.075,-	97

		Konsumen di kabupaten/kota								
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilyah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	12.983.000,-	12	Dokumen	100	12.606.000,-	97
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12	Dokumen	30.408.500,-	12	Dokumen	100	30.408.500,-	100
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	8.911.300,-	1	Dokumen	100	8.534.300,-	96
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	25	Ton	174.098.000,-	51	Ton	202	173.833.529,-	99,84
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	5	Ton	174.098.000,-	5	Ton	100	173.833.529,-	99,84
	Pelaksanaan Pencapaian Tingkat konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi	2150	(kkal/kap/hr)	119.851.000,-	2.058,57	(kkal/kap/hr)	95,7	119.119.775,-	99
		Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein	57	(gram/kap/hr)		58,14	(gram/kap/hr)	102		
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	31.476.000,-	1	Dokumen	100	30.884.000,-	98
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	4	Laporan	88.375.000,-	4	Laporan	100	88.235.775-	99,84

		Pangan Berbasis Sumber daya Lokal								
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2	Pekon	12.493.000,-	2	Pekon	100	12.481.000,-	99,90
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen/peta ketahanan pangan	1	Peta	12.493.000,-	1	Peta	100	12.481.000,-	99,90
	Pemutakhiran dan analisa ketahanan dan Kerentanan pangan	Jumlah Dokumen Analisa Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1	Dokumen	12.493.000,-	1	Dokumen	100	12.481.000,-	99,90
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	> 80	%	23.495.000,-	> 80	%	100	23.224.439,-	99
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/kota	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	2	Jenis	23.495.000,-	2	Jenis	100	23.224.439,-	99
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi keamanan pangan segar asala tumbuhan daerah	1	Dokumen	23.495.000,-	1	Dokumen	100	23.224.439,-	99

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Laporan Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal Nomor : 700/LHE-71/II/2025, tanggal 26 Mei 2026. Dinas Ketahanan Pangan terdapat Rekomendasi Tindak Lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Rekomendasi LHE AKIP

Agar Dinas Ketahanan Pangan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) menginformasikan perbandingan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) seperti dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota/Daerah Kabupaten Lain, serta Pengukuran Kinerja harus dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, melakukan Revisi dokumen perencanaan Kinerja Perubahan 2024 dengan mencantumkan alasan perubahan yang menggunakan analisis data yang tepat dan rasional sebagai alasan perubahan anggaran dan target kinerja dari Sub Kegiatan pada TA 2024 untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan tepat guna dan tepat sasaran.

2. Tindak Lanjut

Bahwa dalam Laporan Kinerja (LKjIP) dimaksud telah kami informasikan tentang perbandingan realisasi kinerja dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya. Pengukuran Kinerja telah dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan motivasi kerja setiap pegawai dengan dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan daftar kehadiran dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dokumen Perencanaan Kinerja Perubahan 2024 telah mencantumkan alasan perubahan yang menggunakan analisis data yang tepat dan rasional.

3. **Bukti Dukung**

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) dinas Ketahanan Pangan telah memberikan perbandingan realisasi kinerja dengan Dinas ketahanan Pangan Provinsi Lampung, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat. Telah melaksanakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan daftar kehadiran dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dokumen Perencanaan Kinerja Perubahan 2024 (Renja Perubahan 2024) telah mencantumkan alasan perubahan Anggaran.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (out comes) dengan sasaran 1 terdiri dari 1 indikator.

A. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	% Daerah Rawan Pangan	%	11,02	2,21	498,6

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka menurunkan daerah rawan pangan sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 498,6% ditunjukkan pada indikator % Daerah Rawan Pangan, dengan capaian kinerja 498,6%. Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dan perbandingan dengan Tahun 2021 s.d 2024

Tujuan	Sasaran Streategis	Indikator kinerja tujuan/sasaran	Realisasi				2025		Tingkat Capaian (%)
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Rawan Pangan	16,19 %	16,17 %	14,70 %	12,50 %	11,02%	2,21%	498,6 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Dari tabel tabel diatas dapat diketahui, bahwa capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Indikator Tujuan yaitu Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 77,71 dari target 72.90 menandakan kondisi pangan di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek akses, dan aspek pemanfaatan pangan. Hal ini ditandai dengan Skor PPH ketersediaan sebesar 99,13 Point, skor PPH konsumsi sebesar 88,72 Point;

- b. Menurunnya tingkat kerawanan pangan dengan indikator Persentase (%) daerah rawan pangan, untuk tahun 2025 dengan target persentase daerah rawan pangan adalah 11,02% terealisasi sebesar 2,21%. Artinya, jumlah pekon rawan pangan di Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan yang sangat besar, hal ini menunjukkan hasil kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang sangat baik. Secara kinerja Tahun 2025 tercapai sesuai target dan ini merupakan kinerja Tahun Ketiga (III) Renstra Tahun 2023-2026, dan bila dibandingkan dengan kinerja ditahun 2021 s.d 2024 kinerja pada Tahun 2025 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu % Desa Rawan Pangan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 terdapat 23 pekon, Tahun 2022 menurun menjadi 22 pekon, Tahun 2023 mengalami penurunan 20 pekon, pada Tahun 2024 turun kembali menjadi 17 pekon dan tahun 2025 turun menjadi 3 pekon.

Indikator yang digunakan dalam penentuan daerah rawan pangan merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah pekon.

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Pekon dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

Pekon rawan pangan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 3 pekon dari 136 pekon (status rentan pangan rendah atau prioritas 3), dengan persentase 2.21% yang tersebar di:

- 1 pekon di Kecamatan Suoh (Pekon Sidorejo)
- 1 pekon di Kecamatan Sukau (Pekon Tapak Siring)
- 1 pekon di Kecamatan Belalau (Pekon Fajar Agung)

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan jumlah pekon rawan pangan cukup tinggi dari 17 pekon menjadi 3 pekon. Hal ini tentunya di dukung oleh perbaikan diberbagai sektor antara lain:

1. Pemberian stimulus pengisian lumpung pangan masyarakat di pekon rawan pangan. Salah satu aspek yang menunjang ketahanan pangan adalah aspek ketersediaan pangan. Kabupaten Lampung Barat sebagian besar penduduknya adalah petani kopi dan hortikultura bukan petani di sektor pangan pokok (padi). Hal ini tentunya dalam pemenuhana kebutuhan pangan pokok (padi) memerlukan *supply* dari daerah lain. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam mengupayakan ketersediaan pangan pokok di daerah rawan pangan adalah dengan pemberian pantuan pengisian lumbung pangan masyarakat. Bantuan / stimulus diberikan untuk kelompok tani yang ada diwilayah daerah rawan pangan sebanyak 1 ton gabah, yang kemudian akan dikelola berdasarkan kesepakatan kelompok. Pada umumnya, akan dikelola dengan sistem simpan pinjam. Apabila ada anggota kelompok / msyarakat di pekon tersebut yang membutuhkan pangan pokok dapat meminjam gabah yang tersedia di lumbung pangan tersebut, kemudian dikembalikan saat memasuki musim panen tiba dengan orientasi bisnis. Artinya, ada kelebihan yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam dengan jumlah yang telah disepakati oleh anggota kelompok. Misal, apabila meminjam 100 Kg, harus dikembalikan 120 Kg, sehingga dengan adanya peraturan tersebut ketersediaan gabah yang di kelola oleh kelompok di lumbung terebut akan

meningkat (kas kelompok akan bertambah). Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan ketersediaan pangan pokok diwilayah rawan pangan dapat ditingkatkan.

2. Penyebaran tenaga kesehatan (bidan pekon) yang hampir merata di seluruh pekon. Dari 136 pekon di Kabupaten Lampung Barat, sudah 99,26% (135 pekon) yang memiliki bidan pekon, artinya hanya ada 0,74% (1 pekon) yang tidak terdapat bidan pekon. Jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, pemerataan bidan pekon ini merupakan langkah yang sangat baik untuk menunjang perbaikan ketahanan pangan pada akses pemanfaatan pangan. Tentunya perbaikan tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat untuk mengupayakan pemerataan pada sektor layanan kesehatan di setiap pekon.

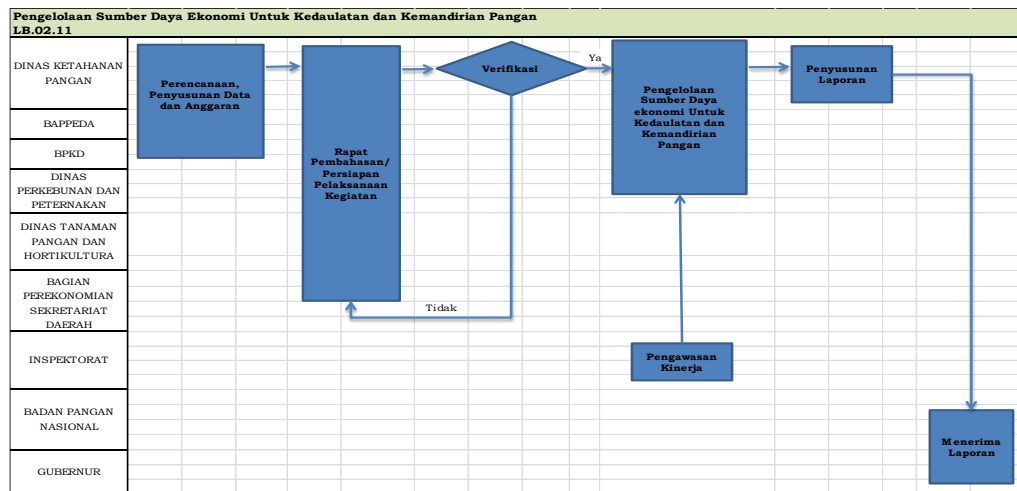
3. Perbaikan infrastruktur jalan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, perbaikan infrastruktur jalan sudah mengalami peningkatan. Hampir seluruh pekon memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Pekon yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, dll) terdapat di Kecamatan Pagar Dewa (Pekon Sidodadi dan Pekon Batu Api) dan Kecamatan Batu Ketulis (Pekon Sumber Rejo). Sementara pekon yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan terdapat di Kecamatan Suoh (Pekon Sido Rejo). Pekon yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun (hanya dapat dilalui menggunakan kendaraan roda 2) terdapat di Kecamatan Lumbok Seminung (Pekon Sukabanjar II Ujung Rembun dan Pekon Pancur Mas). Perbaikan tersebut, merupakan salah satu bentuk kerjasama yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas

Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan aspek keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Dengan adanya akses pangan yang mudah, diharapkan masyarakat tidak terkendala dalam hal pemenuhan pangan dan juga dapat menekan harga pangan, dengan akses yang mudah maka biaya distribusi pangan ke pekan-pekon dapat diminimalisir.

4. Ketersediaan air bersih yang memadai di seluruh pekan. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di pekan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. 100% rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat sudah dapat mengakses air bersih (layak konsumsi).

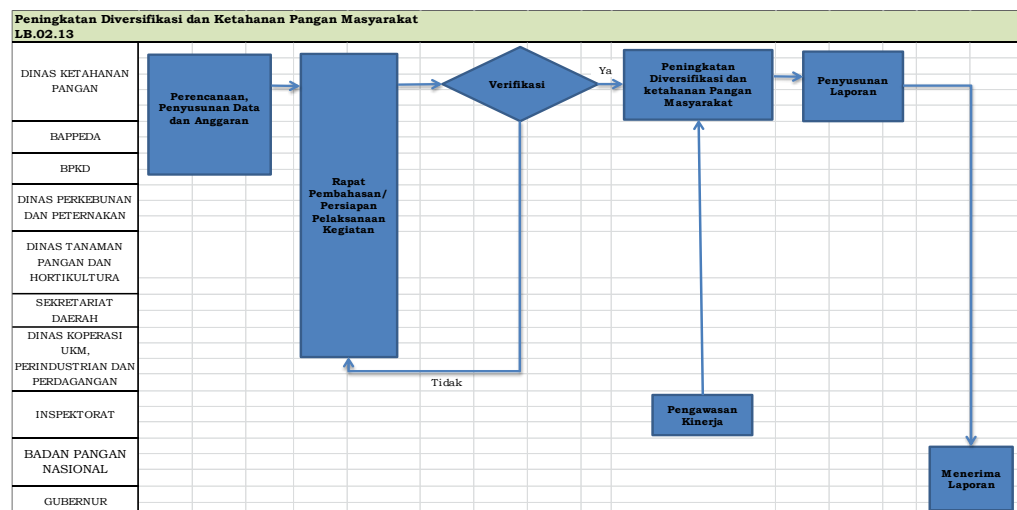
Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan memiliki hubungan dengan perangkat daerah dan instansi lain seperti dengan Badan Perencanaan Daerah, BPKD, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan. Selain dengan Perangkat Daerah terdapat juga hubungan dengan Instansi lain yaitu dengan Badan Pangan Nasional untuk penerima laporan kegiatan. Peta proses bisnis program yang tertuang pada peta proses bisnis berikut ini:

Gambar 4.1 Peta proses bisnis Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan



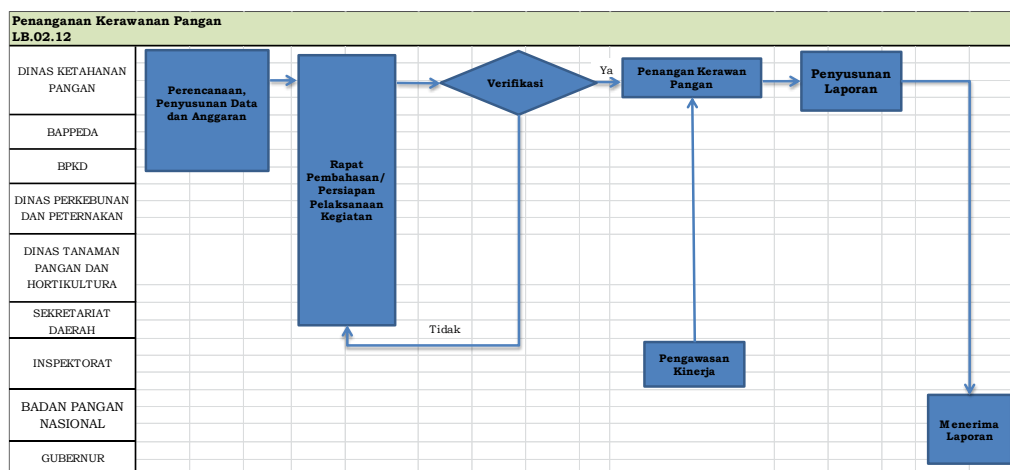
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Gambar4.2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Gambar 4.3 Peta proses bisnis Program Kerawanan Pangan



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan hasil cukup baik, capaian kinerja yang relatif tinggi menunjukkan telah terlaksananya kegiatan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan/ ditargetkan. Tetapi penetapan target capaian kinerja untuk tahun mendatang masih perlu adanya peningkatan.

- Aspek Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta berasal dari impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi masih menjadi salah satu problematika bagi tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan informasi situasi pangan daerah pada periode tertentu. Informasi situasi pangan tersebut meliputi gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk dikonsumsi penduduk per kapita. Salah satu metode dan pendekatan yang dapat digunakan

untuk memperoleh data dan informasi akan produksi, pemanfaatan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi di suatu wilayah pada suatu periode adalah melalui tabel Neraca Bahan Makanan (NBM).

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun), serta dalam gram per kapita per hari (gram/kapita/hari). Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari diterjemahkan ke dalam satuan energi, protein, dan lemak.

Melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) suatu wilayah mendapatkan dasar pertimbangan dalam perencanaan pangan dan gizi. Selanjutnya untuk menilai tingkat keragaman ketersediaan pangan pada suatu wilayah adalah dengan metode Pola Pangan Harapan (PPH). FAO-RAPA mendefinisikan PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Pola pangan harapan dikatakan ideal jika skor PPH suatu daerah adalah 100. Skor PPH mencerminkan situasi kualitas pangan di suatu wilayah. Mengingat pentingnya ketersediaan pangan bagi suatu wilayah, termasuk Kabupaten Lampung Barat, maka sangat penting untuk dilakukan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH). Hasil dari perhitungan ini dapat dijadikan bahan acuan bagi kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan

ketahanan pangan, khususnya ketersediaan pangan. Kegiatan ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi aktual ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat terkait dengan pemenuhan ketersediaan pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat.

- Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pembentuk NBM dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dan observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data primer. Teknik wawancara akan berpedoman pada kuisioner sedangkan observasi dilakukan dengan cara pengamatan ke beberapa pasar rakyat dan modern, lumbung pangan pemerintah dan swasta untuk memperoleh informasi ketersediaan pangan. Data primer yang digunakan adalah data impor dengan pendekatan pasar.

Selain data primer dibutuhkan pula data sekunder sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data sekunder yang dibutuhkan adalah data terkait ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat, seperti data produksi pangan yang berasal dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya data jumlah penduduk pertengahan tahun, laju pertumbuhan penduduk untuk menghitung ketersediaan pangan perkapita berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Data jumlah pasar rakyat, kelas pasar, dan modern berasal dari Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, data ini sebagai data pendukung untuk mengetahui jumlah impor dan ekspor di Kabupaten Lampung Barat.

- Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

Melalui Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Lampung Barat tahun 2025, dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat berasal dari sumber pangan nabati dan hewani. Sumber bahan makanan tersebut dikelompokkan dalam 11 bahan pangan baik berasal dari produk domestik maupun impor. Sumber pangan nabati terdiri atas kelompok pangan padi-padian, makanan berpati, gula, buah atau biji berminyak, buah-buahan, sayuran, dan sebagian kelompok minyak dan lemak. Sumber pangan hewani terdiri atas kelompok pangan daging, telur, susu, ikan, dan sebagian kelompok minyak dan lemak. Sebagian kelompok pangan minyak dan lemak yang termasuk sumber pangan nabati adalah kacang tanah, kopra, dan minyak sawit. Sebagian kelompok minyak dan lemak yang termasuk sumber pangan hewani adalah lemak sapi, lemak kerbau, lemak kambing, dan lemak domba.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh produksi setiap jenis pangan. Besarnya penyediaan pangan ditentukan oleh besarnya produksi yang dihasilkan setiap kelompok pangan dikurangi dengan perubahan stok yang terjadi, ditambah dengan besarnya impor, dan dikurangi besarnya ekspor. Impor diartikan adanya penambahan jumlah kelompok pangan yang berasal dari luar daerah atau kota, sedangkan ekspor berarti adanya perpindahan sejumlah kelompok pangan yang keluar daerah atau kota.

Besarnya penyediaan dalam kota dapat diketahui seberapa besar jumlah kelompok pangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui pemakaian dalam kota (domestic utilization) yang meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, makanan, non makanan, tercecer, dan sejumlah produk yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Berdasarkan perolehan domestic utilization dapat diketahui seberapa besar hasil produksi dari setiap komoditas pangan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan bagi masyarakat. Setiap

kelompok bahan makanan memberikan kontribusi yang berbeda dalam pemenuhan ketersediaan pangan dalam kota. Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Menurut Badan Ketahanan Pangan (2015), dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita pertahun.

Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) dilakukan dalam periode tahunan, sehingga diperoleh informasi kinerja persediaan pangan dalam satu tahun. Berdasarkan hal tersebut, berikut informasi ketersediaan pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025.

- Neraca Bahan Makanan Tahun 2025

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mencapai 3.933 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kalori/kapita/hari.

Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal pangan nabati yaitu sebesar 3.611 kalori/kapita/hari dan sisanya berasal berasal dari pangan hewani yaitu sebesar 323 kalori/kapita/hari.

Secara terinci sumber energi dari kelompok pangan tersebut adalah sebagai berikut :

Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak Perkapita,
Perhari

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	2.000	46	14
Makanan berpati	518	4	3
Gula	398	(1)	(5)
Buah biji berminyak	127	10	6
Buah-buahan	86	1	2
Sayur-sayuran	181	7	2
Daging	186	12	15
Telur	47	3	4
Susu	23	1	1
Ikan	65	13	1
Minyak dan Lemak	303	0	23

Total Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak menurut sumbernya

Sumber Pangan	Nabati	Hewani	Total	Standar WNPG
Energi (kal/kap/hari)	3.611	323	3.933	2.400
Protein (gr/kap/hari)	66,62	29,12	95,74	63
Lemak (gr/kap/hari)	44,71	21,54	66,24	48,88*

Keterangan : *) WHO Tahun 1990

Total ketersediaan protein adalah sebesar 95,74 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan lemak sebesar 66,24 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yaitu sebesar 48,88 gram/kapita/hari.

Jika dilihat dari sumbangannya menurut masing-masing kelompok pangan, ketersediaan energi, protein dan lemak masih didominasi kelompok padi-padian yaitu sebesar 2.000 kalori/kapita/hari, kemudian diikuti kelompok makanan berpati sebesar 518 kalori/kapita/hari, kelompok gula sebesar 398 kalori/kapita/hari.

Kelompok minyak dan lemak sebesar 303 kalori/kapita/hari, kelompok buah-buahan sebesar 86 kalori/kapita/hari, kelompok buah biji berminyak sebesar 127 kalori/kapita/hari, kelompok sayur-sayuran sebesar 181 kalori/kapita/hari, kelompok daging sebesar 186 kalori/kapita/hari, kelompok ikan sebesar 65 kalori/kapita/hari, kelompok telur sebesar 47 kalori/kapita/hari dan kelompok susu sebesar 23 kalori/kapita/hari.

1. Kelompok Padi-Padian

Kelompok padi-padian pada Tahun 2025 memberikan sumbangan zat gizi per kapita sebesar 2.000 kalori/kapita/hari, protein sebesar 46 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 14 gram/kapita/hari. Dalam kelompok padi-padian, komoditas beras memberikan kontribusi terbesar dalam ketersediaan energi, yaitu sebesar 1536 kalori/kapita/hari, protein sebesar 46,38 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 13,98 gram/kapita/hari.

Kontribusi bahan makanan lain yang cukup besar berasal dari komoditas jagung sebesar 464 kalori/kapita/hari, protein sebesar 9,08 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 7,17 gram/kapita/hari.

2. Kelompok Makanan Berpati

Kelompok makanan berpati pada Tahun 2025 memberikan sumbangan zat gizi per kapita sebesar 518 kalori/kapita/hari, protein sebesar 3,84 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 2,74 gram/kapita/hari.

Dari tiga jenis bahan makanan pada kelompok makanan berpati, yang memberi sumbangan terbesar adalah ubi jalar, yaitu energi sebesar 286 kalori/kapita/hari dan protein sebesar 2,34 gram/kapita/hari dan lemak 2,29 gram/kapita/hari.

Dilanjutkan ubi kayu dengan sumbangan energi sebesar 232 kalori/kapita/hari, protein 1,51 gram/kapita/hari dan protein sebesar 0,45 gram/kapita/hari.

3. **Kelompok Gula**

Pada Tahun 2025, kontribusi energi dari kelompok gula (gula pasir dan gula mangkok) dari total ketersediaan dengan sumbangan energi sebesar 398 kalori/kapita/hari, protein 1,36 gram/kapita/hari dan protein sebesar 4,53 gram/kapita/hari.

4. **Kelompok Buah Biji Berminyak**

Komoditas yang termasuk dalam kelompok ini adalah kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan kelapa dengan sumbangan energi sebesar 127 kalori/kapita/hari, protein 9,8 gram/kapita/hari dan protein sebesar 6,10 gram/kapita/hari.

5. **Kelompok Buah-Buahan**

Buah-buahan sebagai sumber vitamin, penyumbang energi sebesar 86 kalori/kapita/hari, protein sebesar 0,98 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 1,89 gram/kapita/hari. Sumbangan energi kelompok buah-buahan berasal dari komoditas pisang sebesar 34 kalori/kapita/hari, protein sebesar 0,37 gram/kapita/hari, lemak sebesar 0,11 gram/kapita/hari. Dilanjutkan komoditas alpokat dengan sumbangan energi sebesar 21 kalori/kapita/hari, protein sebesar 0,22 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 1,60 gram/kapita/hari. Selanjutnya komoditas pepaya dengan sumbangan energi sebesar 12 kalori/kapita/hari, protein sebesar 0,13 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 0 gram/kapita/hari.

6. **Kelompok Sayur - Sayuran**

Peranan sayuran dalam penyediaan energi tidak jauh berbeda dengan kelompok buah-buahan dimana ketersediaan energinya yaitu sebesar 181 kalori/kapita/hari, protein sebesar 6,86 gram/kalori/hari dan lemak 2,04 gram/kalori/hari.

Untuk kelompok sayur-sayuran, penyumbang energi terbesar adalah komoditas Kacang Merah, yaitu sebesar 14 kalori/kapita/hari, protein sebesar 0,73 gram/kalori/hari dan

lemak 0,12 gram/kalori/hari. Dilanjutkan komoditas cabai rawit dengan sumbangan energi sebesar 13 kalori/kapita/hari, protein sebesar 0,53 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 0,21 gram/kapita/hari. Selanjutnya komoditas bawang putih dengan sumbangan energi sebesar 10 kalori/kapita/hari, protein sebesar 0,47 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 0,02 gram/kapita/hari.

7. **Kelompok Daging**

Salah satu ketersediaan pangan hewani berasal dari daging dengan kontribusi energi sebesar 186 kalori/kapita/hari, protein sebesar 11,9 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 15 gram/kapita/hari. Untuk kelompok daging, penyumbang energi terbesar berasal dari daging ayam ras, yaitu sebesar 108 kalori/kapita/hari, protein sebesar 6,48 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 8,91 gram/kapita/hari. Selanjutnya diikuti oleh komoditas daging ayam buras dengan kontribusi energi sebesar 59 kalori/kapita/hari, protein sebesar 3,53 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 4,84 gram/kapita/hari.

8. **Kelompok Telur**

Telur merupakan bagian dari kelompok pangan hewani dengan harga yang relatif murah dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pada Tahun 2025, kelompok telur memberikan sumbangan energi sebesar 47 kalori/kapita/hari, protein sebesar 3,4 gram/kalori/hari dan lemak sebesar 3,53 gram/kapita/hari. Penyumbang kalori terbesar pada kelompok telur adalah telur ayam ras dengan sumbangan energi sebesar 21 kalori/kapita/hari, protein 1,73 gram/kapita/hari dan lemak 1,50 gram/kapita/hari. Dilanjutkan dengan telur ayam buras dengan sumbangan energi sebesar 18 kalori/kapita/hari, protein 1,17 gram/kapita/hari dan lemak 1,37 gram/kapita/hari.

9. **Kelompok Susu**

Kelompok susu merupakan kelompok pangan hewani penyumbang terendah bila dibandingkan kelompok pangan hewani lainnya. Kontribusi zat gizi per kapita Tahun 2025 dari kelompok susu sebesar 23 kalori/kapita/hari, protein sebesar 1,2 gram/kalori/hari dan lemak 1,32 gram/kalori/hari.

10. **Kelompok Ikan**

Pada Tahun 2025, total suplai energi per kapita produk perikanan sebesar 65 kalori/kapita/hari, protein sebesar 12,62 gram/kapita/hari, dan lemak sebesar 1,42 gram/kapita/hari. Pada kelompok Ikan Mas, Lele, Patin, Nila dan Gurami memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap ketersediaan energi bila dibandingkan dengan jenis ikan lainnya.

11. **Kelompok minyak/lemak**

Kelompok ini terdiri dari lemak/minyak nabati dan hewani, Tahun 2025 kontribusi ketersediaannya terhadap ketersediaan energi per kapita per hari sebesar 300 kalori/kapita/hari dan lemak sebesar 0,13 gram/kapita/hari dan lemak sebesar 22,49 gram/kalori/hari. Ketersediaan energi pada kelompok minyak/lemak sebagian besar berasal dari minyak goreng sawit dengan sumbangan energi sebesar 185 kalori/kapita/hari, protein 0,00 gram/kapita/hari dan lemak 9,55 gram/kapita/hari.

ULASAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) didefinisikan sebagai komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya (FAO-RAPA,1989). Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH disusun dengan tujuan untuk

menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutrition balance*) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH Ketersediaan pada setiap tahunnya. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.

Situasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 berdasarkan penghitungan ketersediaan pangan atau hasil Neraca Bahan Makanan Tahun 2025 didapatkan hasil sebagai berikut

**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
Kabupaten Lampung Barat berdasarkan NBM Tahun 2025**

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH Ketersediaan	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	2.000	83,3	0,5	41,67	25,00	25,0	-
2	Umbi-umbian	518	21,6	0,5	10,78	2,50	2,5	-
3	Pangan Hewani	315	13,1	2,0	26,22	24,00	24,0	-
4	Minyak dan Lemak	308	12,9	0,5	6,43	5,00	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	6	0,3	0,5	0,13	0,13	1,0	-
6	Kacang-kacangan	135	5,6	2,0	11,28	10,00	10,0	-
7	Gula	398	16,6	0,5	8,30	2,50	2,5	-
8	Sayuran dan buah	253	10,5	5,0	52,73	30,00	30,0	-
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.933	163,9		157,53	99,13	100,0	-

AKE = 2.400 kkal/kap/hari

Bila dilihat dari persentase AKE dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 memiliki ketersediaan energi sebesar 3.933 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.400 kalori/kapita/hari dengan skor PPH Ketersediaan 99,13 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100.

Tabel 6 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan didominasi oleh kelompok padi padian (25,0), Kelompok pangan hewani (24,0) , kelompok gula (2,5), kelompok minyak dan lemak (5,0) , kacang-kacangan (10,0) dan kelompok sayuran dan buah (30,0). Sedangkan kelompok pangan yang memiliki skor dibawah skor maksimal PPH Ketersediaan, yaitu kelompok buah/biji berminyak (0,13) dengan skor maksimal 1,0.

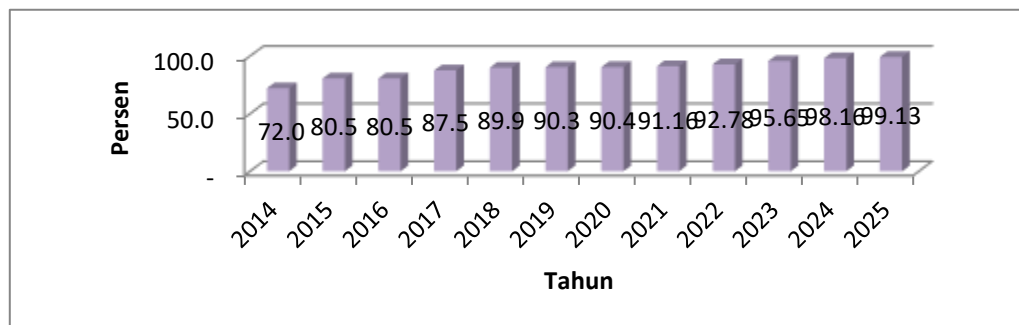
Meskipun ketersediaan energi berdasarkan NBM (kuantitas) telah mencapai 3.933 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (2.400 kalori/kapita/hari), namun secara kualitas (skor PPH Ketersediaan 99,13) belum ideal. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Komposisi skor PPH Ketersediaan untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum mencapai skor maksimal. Hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan.
2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang. Faktor penyebab utama lebih didominasi dari ketersediaan/produksi lokal sayuran dan buah.
3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal, yaitu : kelompok buah/biji berminyak (0,13) dengan skor maksimal 1,0 .

Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.

4. Untuk menganggulangi ketidak beragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat, Dinas Ketahanan Pangan selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait yakni Dinas Perikanan, Dinas Peternakan serta Dinas Koperasi dan perdagangan supaya dapat meningkatkan produksi produk hewani dan melakukan sosialisasi pedagang untuk mengimpor produk produk hewani yang tidak dapat diproduksi oleh Kabupaten Lampung Barat agar ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat menjadi ideal baik ketersediaan pangan hewani dan pangan nabati.

Grafik 4.1 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (Ketersedian).



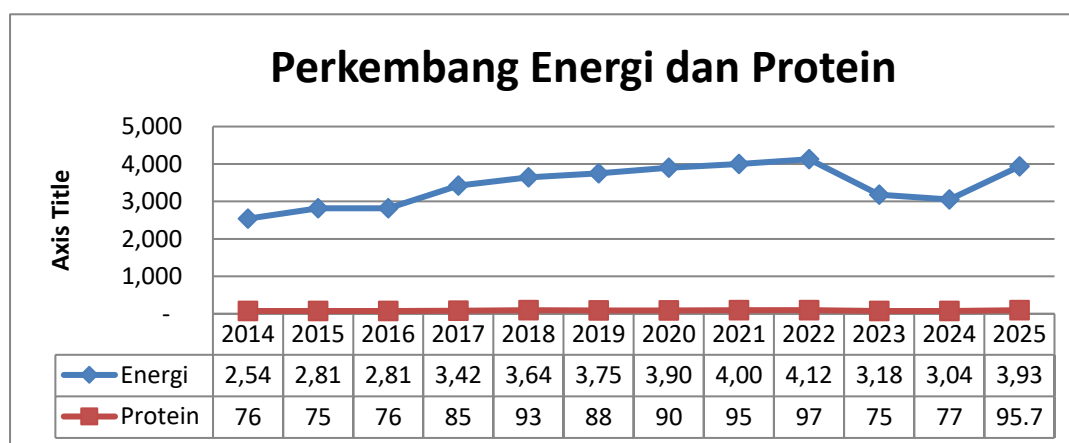
Bila dilihat dari persentase AKE dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 memiliki ketersediaan energi sebesar 3.933 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.400 kalori/kapita/hari, total ketersediaan protein adalah sebesar 95,74 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari. dengan skor PPH Ketersediaan 99,13 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. belum ideal Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Beberapa komposisi skor PPH Ketersediaan untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum mencapai skor maksimal. Hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan.

2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang. Faktor penyebab utama lebih didominasi dari ketersediaan/produksi lokal padi-padian (beras), umbi-umbian, minyak dan lemak, gula (gula pasir), sayuran dan buah.
3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relaif masih rendah.

Trend perkembangan ketersediaan energi, protein Ketersediaan dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 4.2 Perkembangan Ketersediaan Energi dan protein Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2025 (Kkal/kapita/hari).



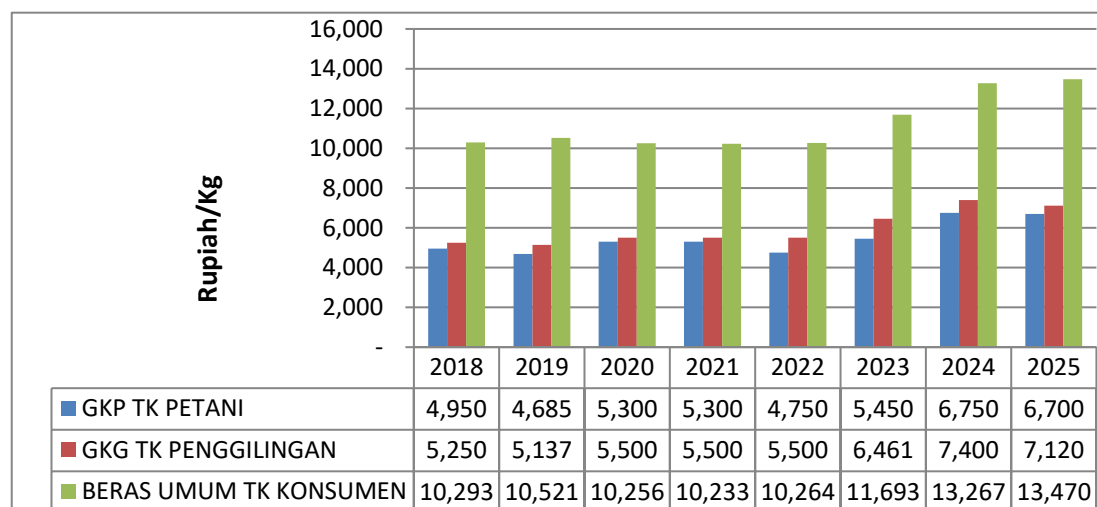
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

- **Aspek Distribusi dan Akses Pangan**

Pada aspek ini memberikan gambaran tentang kemudahan akses pangan bagi masyarakat, hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat akan komoditi pangan. Kestabilan harga pada tingkat konsumen tidak terlepas dari kestabilan pasokan pangan baik yang bersumber dari produksi dalam daerah dan yang berasal dari luar daerah. Jika dilihat dari stok di bulan November yang berjumlah 29.990 ton, produksi beras Lampung Barat selama tahun 2025 yang mencapai 34.308 Ton, dengan jumlah beras di

distributor sebesar 4.440 Ton sehingga total ketersediaan pangan pokok (beras) sebesar 30.021 Ton. Dan diperkirakan pada bulan Desember kebutuhan beras sekitar 2.586 ton, sehingga pada bulan Desember ketersediaan beras masih surplus 30.021 ton. Dengan harga rata – rata beras medium ditingkat konsumen sebesar Rp. 13.470/kg, dengan tingkat koefisien variasi (CV) di 2.8 %, Tingkat kesetabilan harga gabah ditingkat petani merupakan faktor penentu dari tingkat kesetabilan harga dan daya beli masyarakat, dikarenakan mayoritas penduduk lampung barat berprofesi sebagai petani (baik petani Sawah maupun perkebunan) pada tahun 2025 harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani yang ditargetkan Rp.6.700/kg mencapai Rp. 6.853,-/kg . hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan harga pangan pokok (beras) dan gabah pada table berikut :

Grafik 4.3. Perkembangan harga gabah dan beras di tingkat petani



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Pada tahun 2025 harga beras kualitas medium rata-rata sebesar Rp.13.470/Kg, harga tertinggi Rp.13.944/Kg dan terendah Rp.12.598/Kg. Secara umum koefisien variasi (CV) harga beras antar waktu cukup stabil, ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan stabilisasi harga pangan pokok cukup berhasil dengan CV = 2,8%.

Perkembangan harga beras periode Januari - Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Perkembangan harga pangan strategis Tahun 2025

No	KOMODITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TARGET	KOOFISIEN VARIASI (CV) HARGA PERBULAN
1	Beras Premium	13.977	14.002	14.046	14.026	13.887	13.928	14.283	14.590	14.673	14.653	14.690	14.684	10,0	2,395
2	Beras Medium	13.073	13.077	13.092	13.092	12.958	13.048	13.375	13.677	13.944	13.852	13.828	13.756	10,0	2,853
3	Beras Asalan	12.395	12.396	11.938	12.122	11.775	12.605	12.505	13.271	13.917	14.019	14.275	13.486	10,0	6,700
4	Jagung	7.227	7.833	7.875	7.783	7.665	7.783	8.060	8.492	8.500	8.300	8.533	8.600	10,0	5,349
5	Bawang Merah	33.840	31.342	42.183	48.550	38.592	40.150	43.853	46.600	37.240	37.783	37.483	42.778	25,0	12,552
6	Bawang Putih	39.520	39.800	40.967	44.183	38.733	36.750	37.173	36.550	34.560	35.200	35.000	34.533	25,0	7,883
7	Cabai Besar	58.559	58.269	43.705	38.697	35.261	37.173	39.815	36.000	46.705	49.558	51.538	59.387	30,0	19,794
8	Cabe Keriting	66.155	66.765	56.696	46.833	42.417	43.200	46.357	42.883	56.038	59.076	61.750	72.778	30,0	19,205
9	Cabai Rawit	59.742	69.383	58.317	41.583	34.892	37.608	46.867	41.233	46.560	36.617	32.033	53.778	30,0	24,786
10	Daging Sapi / Kerbau	138.538	138.462	139.904	140.000	139.231	139.904	140.000	139.519	138.385	139.231	139.038	139.744	10,0	0,440
11	Daging Ayam Ras	39.187	39.300	38.817	37.583	36.542	38.383	38.787	38.950	39.613	40.167	40.200	41.222	10,0	3,155
12	Telur Ayam Ras	30.680	29.333	30.000	29.192	28.775	29.108	29.453	29.867	29.853	29.983	30.583	30.667	10,0	2,136
13	Gula Pasir	18.133	18.433	18.533	18.658	19.092	19.267	19.313	18.950	18.747	18.508	18.450	18.367	10,0	2,005
14	Minyak Goreng Kemasan	18.560	19.417	19.658	20.017	20.017	20.083	20.133	20.150	20.147	19.767	19.717	19.822	10,0	2,280
15	Minyak Goreng Curah	17.151	18.280	18.284	18.341	18.352	18.514	18.478	18.618	18.727	18.705	18.718	18.933	10,0	2,448
16	Tepung Terigu	13.614	13.567	13.133	13.033	13.175	13.167	13.160	12.983	12.987	12.958	13.017	13.033	10,0	1,664
17	Kedelai	14.076	14.636	14.059	14.452	14.110	14.313	14.590	14.838	14.800	14.758	14.718	15.033	10	2,3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Jika dilihat dari koefisien variasi (CV) harga pangan pokok terutama beras belum melebihi angka maksimal CV=10% sehingga harga masih stabil walaupun mengalami kenaikan harga. Walaupun demikian harga beras sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun sehingga Dinas Ketahanan Pangan sebagai bagian yang berperan dalam menjaga stabilisasi Pasokan dan harga pangan berusaha untuk menjaga daya beli masyarakat terutama terhadap pangan pokok dan melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah. Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 10 titik sepanjang tahun 2025. Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini bekerjasama dengan BULOG sebagai penyedia pangan pokok berupa Beras SPHP, Minyak Goreng, Tepung terigu dan gula pasir. Pangan pokok yang dijual di kegiatan Gerakan Pangan Murah merupakan pangan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Beras SPHP di jual dengan harga Rp. 11.200/kg; Minyak goreng Rp.15.000-/liter; Gula pasir Rp. 17.000-Rp.17.500/kg, dan tepung terigu Rp.10.000/kg, jika dibandingkan dengan tabel 4.3 terlihat bahawa harga pangan pokok yang dijual di Gerakan Pangan Murah lebih rendah dibandingkan harga di pasaran.

Selain Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan melakukan giat distribusi pangan pokok agar masyarakat dapat menjangkau beras murah dengan menjadi fasilitator dalam mendaftarkan kios pangan menjadi mitra beras SPHP dengan BULOG. Kios Pangan merupakan pedagang di lingkungan pasar maupun di luar pasar dengan dominasi atau lokasi toko di Kabupaten Lampung Barat . Hingga Desember 2025 jumlah kios pangan yang terdaftar menjadi mitra BULOG sesuai SK yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Nomor : 41.1/KPTS/III.08/2025 tentang Outlet Pangan Binaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yakni sebanyak 44

Kios Pangan. Kios pangan tersebut dapat mendistribusikan beras SPHP sebanyak 2 ton per minggu.

Dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah dan pendaftaran Kios Pangan sebagai Mitra BULOG penyalur beras SPHP dan Minyak Goreng Kita, masyarakat Lampung Barat dapat membeli Beras dan Minyak Goreng dengan harga yang murah dibandingkan dengan Merk lain dengan kualitas yang sama.

Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Barat karena merupakan komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Lampung Barat. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan. Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat monitoring harga dilakukan oleh petugas panel harga yang berasal dari pelaksana bidang distribusi harga dan kelembagaan pangan dan dilakukan monitoring harga gabah setiap hari dengan mengisi link petugaspanelharga.badanpangan.go.id. Sedangkan sebagai masyarakat dan perangkat daerah yang membutuhkan data harga pangan baik ditingkat konsumen dan produsen dapat mengakses melalui link <https://panelharga.badanpangan.go.id/beranda>.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.700,-/kg. Perubahan harga GKP di tingkat petani relatif kecil, dan cenderung stabil.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp.6.500. Jika dibandingkan dengan penetapan HPP tersebut maka harga aktual di Lampung Barat telah berada di atas HPP. Jika harga gabah kering panen (GKP) di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), artinya petani diuntungkan karena hasil panen dihargai lebih tinggi dari standar minimum pemerintah. Petani memiliki kebebasan menjual ke pasar umum (seringkali melalui pengepul/penggilingan swasta) yang menawarkan harga lebih tinggi daripada HPP yang ditetapkan, seringkali mencapai Rp6.500/kg atau lebih di tingkat petani dan di Lampung Barat Petani menjual Rp.6700/kg sehingga lebih tinggi dari harga HPP yakni Rp. 6500/kg.

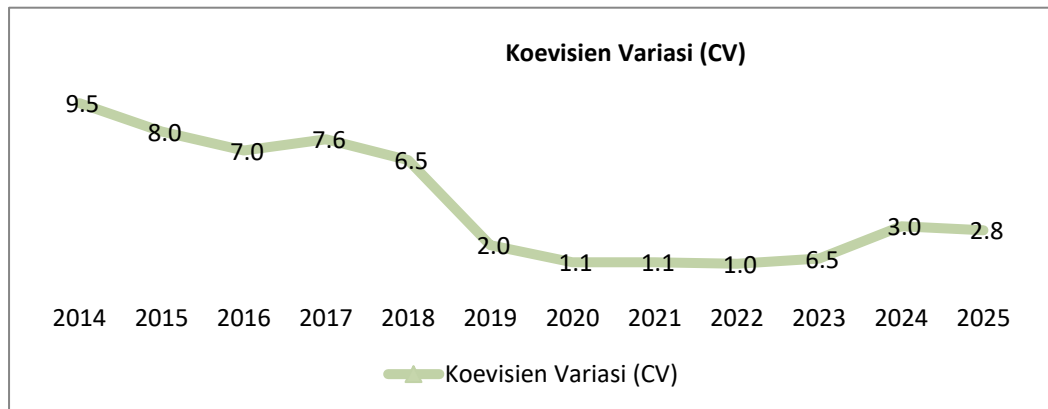
Berikut adalah konsekuensi jika harga GKP di atas HPP:

- Petani Lebih Sejahtera: Pendapatan petani meningkat dan risiko kerugian akibat biaya produksi tinggi dapat dihindari.
- Peran Bulog Berkurang: Perum Bulog mungkin kesulitan menyerap gabah petani jika harga pasar terlalu tinggi di atas HPP, sehingga Bulog fokus memaksimalkan Sentra Penggilingan Padi (SPP) dan membeli gabah di tingkat petani dengan jemput bola.
- Indikator Produksi Bagus: Menunjukkan stabilitas stok pangan yang baik, di mana petani tidak perlu dipaksa menjual ke pemerintah karena harga pasar sedang bagus.

Secara singkat, kondisi ini membuat petani mendapatkan keuntungan yang lebih wajar dan berkelanjutan.

Tingkat kesetabilan harga pangan pokok di tingkat konsumen dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 4.4 : Perkembangan Tingkat Kestabilan Harga Pangan Pokok



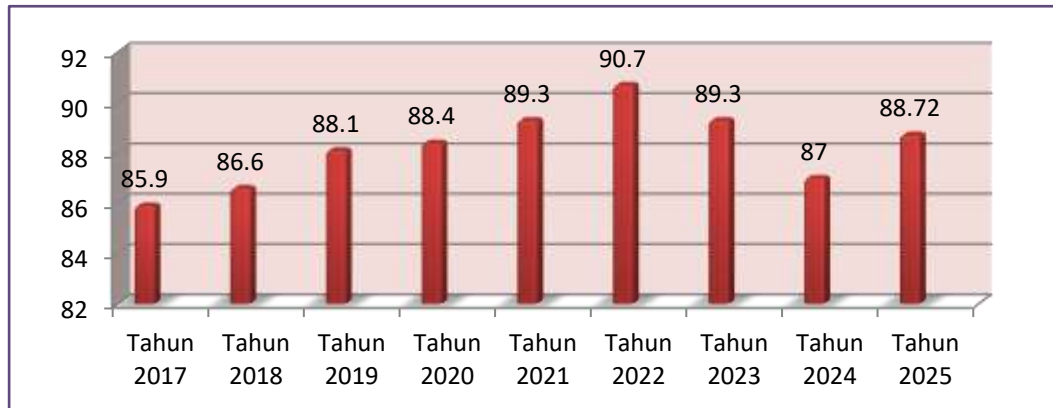
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

- **Aspek Konsumsi Pangan**

Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat meliputi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan (PPH). Konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Perkembangan pencapaian skor PPH konsumsi disajikan pada table berikut:

Berdasarkan tabel, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, tahun 2017 - 2025 terjadi kenaikan skor PPH konsumsi dari 85,9 menjadi 88,72. Perkembangan pencapaian skor PPH Konsumsi digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 4.5. Grafik perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2025



Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025.

Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomen Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG XI Tahun 2018, yaitu Angka Kecukupan Energi/AKE 2.100 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari).

Dari hasil analisa pola konsumsi pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat dari masing-masing kelompok pangan masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian dalam pemenuhan kebutuhan energi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Konsumsi Energi dan Protein Kabupaten Lampung Barat Th 2025

KELOMPOK PANGAN	Berat (gram/kap/hari)	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)	SKOR MAKS
Padi-padian	286,61	1.113,98	25,12	25,00
Umbi-umbian	53,22	63,85	0,75	2,50
Pangan Hewani	105,15	192,47	17,82	24,00
Minyak dan Lemak	33,43	300,49	0,03	5,00
Buah/Biji Berminyak	2,80	15,56	0,23	1,00
Kacang-kacangan	25,72	64,70	5,18	10,00
Gula	27,91	98,05	0,54	2,50
Sayur dan Buah	303,08	153,73	5,86	30,00
Lain-lain	64,90	55,73	2,61	0,00
	902,80	2.058,57	58,14	100,00

Sumber : Badan Pangan Nasional 2025

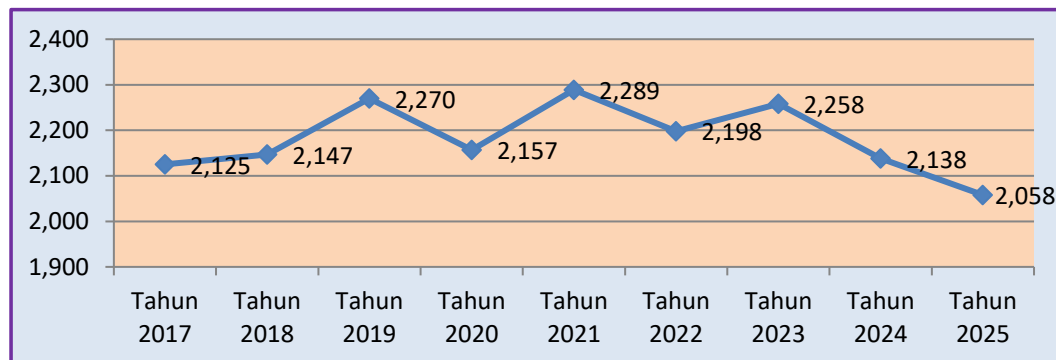
Tingkat konsumsi energi dan protein merupakan indikator utama untuk menilai kecukupan pangan masyarakat. Konsumsi energi menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kalori harian, sedangkan konsumsi protein berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan zat pembangun tubuh.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lampung Barat mencapai 2.058,57 kkal/kapita/hari. Angka ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif konsumsi energi relatif mencukupi. Namun, tingkat konsumsi protein tercatat sebesar 58,14 gram per kapita per hari, yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kualitas gizi masyarakat.

Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi

beras melalui peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan.

Grafik 4.6 : Perkembangan konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2025



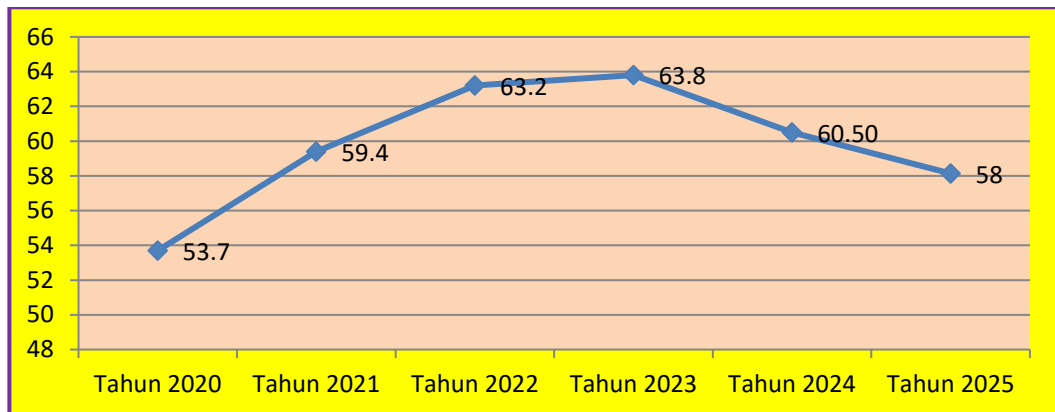
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Konsumsi energi pada tahun 2025 mengalami Penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Analisis konsumsi pangan Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa secara kuantitatif tingkat konsumsi energi masyarakat relatif mencukupi. Namun demikian, dari aspek kualitas, pola konsumsi pangan masyarakat masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Hal ini tercermin dari capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum mencapai nilai ideal serta masih rendahnya konsumsi pangan sumber protein baik hewani maupun nabati dan kelebihan konsumsi beras, minyak dan lemak.

Permasalahan konsumsi pangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan dan preferensi konsumsi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor akses, keterjangkauan, literasi gizi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pangan lokal. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu jenis pangan pokok, khususnya beras, serta kecenderungan konsumsi minyak dan lemak yang relatif tinggi menjadi

tantangan dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang sehat dan seimbang.

Garfik 4.7 : Perkembangan rata-rata konsumsi protein (gram/kap/hr)
Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2025



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

B. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

Tingkat capain kinerja dinas ketahanan pangan tahun 2025 dan di bandingkan dengan target capaian pada tahun 2024 :

Tabel 4.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	76,18 Point	72,90 Point	77,15 Point	105 %
Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Rawan Pangan	12,50 %	11,02%	2,21%	498,6%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Skor Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 sebesar 77,15 Point dari tahun sebelumnya tahun 2024 yaitu 76,18 point, mengalami kenaikan sebesar 0,97 point.
2. Menurunnya tingkat kerawanan pangan dengan indikator Persentase (%) daerah rawan pangan, untuk Tahun 2025 dengan target 11,02 % terealisasi sebesar 2,21% jadi secara kinerja Tahun 2025 tercapai sesuai target dan bila dibandingkan dengan kinerja pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu adanya penurunan tingkat kerawanan pangan sebesar 10,29%. Dengan rincian pada Tahun 2024 terdapat 17 pekon/desa rentan pangan dan pada tahun 2025 terdapat 3 pekon/desa rentan pangan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Nasional

a. Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia pada tahun 2025 berada di angka 73 %. Sementara itu hasil dari perhitungan Indeks Ketahanan Pangan 2025 untuk wilayah kabupaten, Kabupaten Lampung Barat memiliki skor Indeks Ketahanan Pangan di angka 77,15%.

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersedian dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor pola Pangan Harapan (Tingkat ketersediaan) pada tahun 2025 sebesar 99,13 jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 98,16 mengalami kenaikan sebesar 0,97, jika dibandingkan pada tahun 2022 capaian yang di capai sebesar 92,78 mengalami kenaikan sebesar 6,35 Point dan pada tahun 2021 capaian yang di capai sebesar 91,16 mengalami kenaikan

7,97 Point, ini menunjukkan ketersediaan pangan telah terpenuhi bagi masyarakat lampung barat Jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan oleh badan ketahanan pangan kementrian pertanian republik Indonesia berdasarkan Widya Pangan dan Gizi Nusantra Ke- XI tahun 2021 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan nasional sebesar 90,4 Point, dengan ketersediaan energi sebesar 2400.kkal/kap/hr dan ketersediaan protein sebesar 69 gr/kpa/hari. ini berarti Ketersediaan Pangan di lampung barat sudah melampaui skor pola pangan harapan nasional sebesar 8,73 point, dengan ketersediaan energi sebesar 3.933 kkal/kap/hr dan ketersediaan protein sebesar 95,74 gr/kap/hari.

3. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Provinsi Lampung

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Global atau *Global Food Safety Initiative* (GFSI), Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung pada tahun 2023 berada di angka 60,2% Sementara itu hasil dari perhitungan Indeks Ketahanan Pangan 2024 untuk wilayah kabupaten, Kabupaten Lampung Barat memiliki skor Indeks Ketahanan Pangan di angka 76,18%.

4. Benchmarking

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,97 point jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni dari 76,18 point menjadi 77,15. dibandingkan dengan Kabupaten lain yang berada di Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat masih lebih tinggi dari 10 Kabupaten/kota, dan ketinggalan dengan 4 Kabupaten/Kota (Kota Metro 83,67%, Kabupaten Lampung selatan 82,23%, Kabupaten Mesuji 79,38% dan Kabupaten Way

kanan 78,82%). Namun tidak terlalu signifikan hanya selisih antara 1,67% - 6,52%.

C. Realisasi Anggaran

Untuk Mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program termasuk program rutin sebanyak 5 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin 34 Sub Kegiatan Alokasi dana Tahun 2024 Untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.549.683.815,- teralisasi Rp. 3.268.549.946,- atau 92,08%, (Belanja Pegawai Rp. 2.389.391.815,- teralisasi sebesar Rp. 2.135.025.134,- atau 89,35%, Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.160.292.500,-. Terealisasi Rp. 1.133.524.812,- atau 97,69%).

Tabel. 4.6
Realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2025

U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.365.076.491	Rp 2.280.676.425	96,43	Rp 84.400.066
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 24.607.000	Rp 24.351.000	98,96	Rp 256.000
Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp 2.096.571.791	Rp 2.025.932.052	96,63	Rp 70.639.739
Administrasi Brang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 1.053.400	Rp 1.053.400	100	Rp 0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.355.000	Rp 1.355.000	100	Rp 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 95.106.500	Rp 94.198.521	99,05	Rp. 907.979
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 69.030.400	Rp 59.627.350	86,38	Rp 9.403.050
Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah	Rp 77.352.400	Rp 74.159.102	95,87	Rp 3.193.298

penunjan urusan pemerintah daerah				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp 74.893.000	Rp 74.654.500	99,68	Rp 238.500
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh pendukung kemandirian pangan	Rp 74.893.000	Rp 74.654.500	99,68	Rp 238.500
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 501.251.800	Rp 495.00.179	98,75	Rp 6.251.621
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Rp 207.302.800	Rp 202.046.875	97,46	Rp 5.255.925
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 174.098.000	Rp 173.833.529	99,85	Rp 264.471
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi	Rp 119.851.000	Rp 119.119.775	99,39	Rp 731.225
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 12.493.000	Rp 12.481.000	99,9	Rp 12.000
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 12.493.000	Rp 12.481.000	99,9	Rp 12.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 23.495.000	Rp 23.224.439	98,85	Rp 270.561
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.495.000	Rp 23.224.439	98,85	Rp 270.561

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2026

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tujuan dari Pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dan semua individu pegawai untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders atau pihak lain dan juga masyarakat yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

BAB V.

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.1 tabel Capaian sasaran, indikator dan capaian

No	Sasaran	Indikator	Capaian
1.	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Rawan Pangan	498 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2027

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.977.209.291,- dan teralisasi sebesar Rp 2.886.036.543,- atau 96,94 %.

Tingkat capain kinerja dinas ketahanan pangan pada tahun 2025 sebesar 100 % dan tingkat capaian realisasi anggran 96,94 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.977.209.291,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.886.036.543,- terdapat evisiensi sumberdaya pada tahun 2025 sebesar 3,06 % maka dapat disimpulkan bahawa dengan sarana dan prasarana yang tercantu diatas, dinas ketahanan pangan kabupaten lampung barat dapat memaksimalkan kinerja dinas yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang sudah tercantun di dalam renstra dinas belum dapat dilaksanakan untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun telah mencapai hasil sesuai dengan rencana kinerja dan penetapan kinerja Tahun 2025 Adapun dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis capaian kinerja maka capaian kinerja sasaran secara umum sudah baik. Pencapaian kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 pada setiap indikator adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Tujuan yaitu Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 77,15 dari target 72,90 menandakan kondisi pangan di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek akses, dan aspek pemanfaatan pangan. Hal

ini ditandai dengan Skor PPH ketersediaan sebesar 99,13 Point, skor PPH konsumsi sebesar 88,72 Point.

- b. Menurunnya tingkat kerawanan pangan dengan indikator Persentase (%) daerah rawan pangan, untuk tahun 2025 dengan target 11,02 % terealisasi sebesar 2,21%. Dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu terjadinya penurunan pekon rentan pangan yaitu yang sebelumnya 17 pekon/desa menjadi 3 pekon/desa.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa indikator faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Ada tiga indikator keberhasilan yaitu indikator pemanfaatan Pangan, Ketersediaan, dan Akses Pangan dijelaskan sebagai berikut:

- **Pemanfaatan Pangan**

Dari aspek pemanfaatan pangan secara umum konsumsi energi di Kabupaten Lampung Barat mencapai 2.058,57 kkal/kapita/hari. Secara kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor Pola Pangan Harapan konsumsi 88,72 dan komposisinya dari seluruh kelompok pangan. Dari aspek ketersediaan.

- **Ketersediaan**

Secara aspek Ketersediaan, Ketersediaan Energi di Kabupaten Lampung Barat sudah baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan Ketersediaan Energi sebesar 3.933 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.400 kalori/kapita/hari, sedangkan ketersediaan protein sebesar 95,74 gram/kalori/hari dan lemak sebesar 66,24 gram/kapita/hari.

- **Akses Pangan**

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator aspek akses terhadap pangan, dapat dilihat bahwa skor komposit dari

indikator-indikator akses terhadap pangan di kabupaten Lampung Barat dalam kategori aman.

Pada tingkat kecamatan yang berada pada kondisi aman terdapat 15 kecamatan, berdasarkan hasil analisa pada 15 kecamatan kecenderungan harga pangan pokok stabil.

C. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain adalah:

1. Masih banyak jenis bahan pangan yang belum mampu dipenuhi dari produksi dalam daerah tetapi masih diimpor dari luar daerah seperti daging ayam, telur, kacang-kacangan, dan lainnya
2. Ketersediaan data kurang tepat waktu
3. Kurang optimalnya sarana dan prasarana petugas pemantau harga pangan pokok strategis
4. Tingkat daya beli masyarakat Lampung Barat yang belum baik dan cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan
5. Harga pangan di Kabupaten Lampung Barat cenderung tinggi akibat tingginya biaya transportasi bahan pangan dari pusat produksi terutama pangan yang diimpor dari luar daerah.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan perjanjian kinerja pada tiap tiap Jabatan sebagai dasar penilain keberhasilan yang dituangkan dalam dokumen SKP pada masing masing Pegawai.

2. Melakukan Evaluasi secara berkala pada target capaian kinerja mulai dari tingkatan individu maupun OPD minimal 3 bulan sekali (Evaluasi Renja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja).
3. Koordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas Infokom untuk mengadakan portal perkembangan harga pangan pada situs resmi atau portal Pemkab Lampung Barat sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan harga setiap hari
4. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui Aplikasi SAKTI BERKIBAR secara continue.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain dan juga masyarakat yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

LIWA, 09 Februari 2026
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Ir. NATA DJUDIN AMRAN, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661226 199203 1 001

LAMPIRAN

**SEREMONIAL PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN LAMPUNG BARAT**

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



EVALUSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



SELAYANG PANDANG KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

GERAKAN PANGAN MURAH LAMPUNG BARAT



CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

STABILISASI PASOKAN HARGA PANGAN



PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH



PEMBINAAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP)



PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK UJI LABORATORIUM

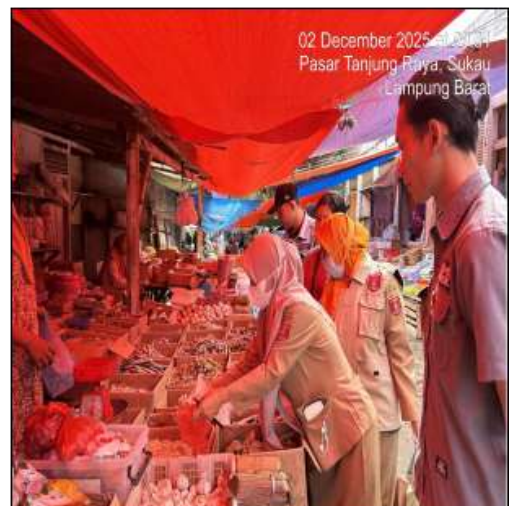


PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK UJI RAPIT TEST

SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN

RAPAT KOORDINASI TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN



PENGAWASAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL OLEH TIM JEJARING

RAPID TEST OLEH TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Kapten Piere Tandeau Komplek BPP Sebarus Balik Bukit

LIWA, 34812

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, **tidak terdapat** kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Liwa, 20 Januari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas
Ketahanan Pangan



Ir. Nafa Djudin Amran, M.M
NIP. 19660226 199203 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)

TIM Internal Reviu LKjIP
Dinas Ketahanan Pangan

- 1 **Erwiensyah Husein, S.H, M.H**
Sekretaris
- 2 **Muhlatip, S.H, M.M**
Kabid Ketersediaan,
cadangan dan kerawanan Pangan
- 3 **Kelana Indah Susilawati, S.Hut, MP**
Kabid Konsumsi,
Penganekaragaman, Mutu
dan Keamanan Pangan
4. **Yosta Sasta Budi Sandi, S.E**
Kabid Distribusi, Harga
dan Kelembagaan Pangan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Kapten Piere Tandean Komplek BPP Sebarus Balik Bukit
LIWA, 34812

**PERNYATAAN REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGRAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Kabupaten Lampung Barat Tahun anggran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini maka untuk selanjutnya memrintahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan untuk melaksnakan Asistensi ke Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 20 Januari 2026

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



Ip. NATA DJUDIN AMRAN, M.M
PEMBAKUTAMA UTAMA MUDA
NIP. 19661226 199203 1 001

LAMPIRAN :

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGRAN 2025

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dimana pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 salah satunya memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal.

Untuk mencapai tujuan Dnas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan sasaran beserta indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan, dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025 sebanyak1 sasaran, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator. Untuk mencapai kinerja sasaran tersebut, terdapat 5 program 16 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran menunjukkan bahwa persentase pencapaian sasaran telah mencapai lebih dari 100,0 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025 sangat baik dan terukur.

Secara keseluruhan anggaran program dan kegiatan belanja langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.977.209.291,- terealisasi sebesar Rp. 2.886.036.543,- (96,94%) sedangkan realisasi fisik (output) sebesar 100,00% dan (outcome) mencapai 100,00%. Sehingga terdapat efisiensi sebesar 3,06 %

Berdasarkan analisis capaian kinerja maka capaian kinerja sasaran secara umum sudah baik. Pencapaian kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 pada setiap indikator adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Tujuan yaitu Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 77,15% dari target 72,90% menandakan kondisi pangan di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek akses, dan aspek pemanfaatan pangan. Hal ini ditandai dengan Skor PPH ketersediaan sebesar 99,13 Point, skor PPH konsumsi sebesar 88,72 Point.

Secara kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai Tujuan yaitu Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 77,15% Kalau dibandingkan dengan Kabupaten lain yang berada di Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat masih lebih tinggi dari 10 Kabupaten/kota, dan ketinggalan dengan 4 Kabupaten/Kota (Kota Metro 83,67%, Kabupaten Lampung selatan 82,23%, Kabupaten Mesuji 79,38% dan Kabupaten Way kanan 78,82%). Namun tidak terlalu signifikan hanya selisih antara 1,67% - 6,52%.

- b. Menurunnya tingkat kerawanan pangan dengan indikator Persentase (%) daerah rawan pangan, untuk tahun 2025 dengan target 11,02% terealisasi sebesar 2,21 % jadi secara kinerja Tahun 2025 tercapai sesuai target dan ini merupakan kinerja Tahun Ketiga (II) Renstra Tahun 2023-2026, dan bila dibandingkan dengan kinerja ditahun 2021 s.d 2024 kinerja pada Tahun 2025 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan mengalami peningkatan yaitu % Desa Rawan Pangan mengalami penurunan Tahun 2021 terdapat 23 desa, Tahun 2022 menurun menjadi 22 desa, Tahun 2023 mengalami penurunan 20 desa, pada Tahun 2024 turun kembali menjadi 17 desa dan tahun 2025 turun menjadi 3 desa.

Analisis faktor pendukung keberhasilan

Terdapat beberapa indikator faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Ada tiga indikator keberhasilan yaitu indikator pemanfaatan Pangan, Ketersediaan, dan Akses Pangan.

1. Pemanfaatan Pangan

Dari aspek pemanfaatan pangan secara umum konsumsi energi di Kabupaten Lampung Barat mencapai 2,058,57 kkal/kapita/hari. Secara kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor Pola Pangan Harapan 88,72 point dan komposisinya dari seluruh kelompok pangan. Dari aspek ketersediaan.

2. Ketersediaan

Secara aspek Ketersediaan, Ketersediaan Energi di Kabupaten Lampung Barat sudah baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan Ketersediaan Energi sebesar 3.933 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.400 kalori/kapita/hari, sedangkan ketersediaan protein sebesar 95,74 gram/kalori/hari dan lemak sebesar 66,24 gram/kapita/hari.

3. Akses Pangan

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator aspek akses terhadap pangan, dapat dilihat bahwa skor komposit dari indikator-indikator akses terhadap pangan di kabupaten Lampung Barat dalam kategori aman.

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator aspek akses terhadap pangan, dapat dilihat bahwa skor komposit dari indikator-indikator akses terhadap pangan di kabupaten Lampung Barat dalam kategori aman. Pada tingkat kecamatan yang berada pada kondisi aman terdapat 15 kecamatan, berdasarkan hasil analisa pada 15 kecamatan kecenderungan harga pangan pokok stabil.

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan instansi teknis dalam upaya peningkatan produksi komoditas yang mendukung energi dan protein nabati dan hewani;
2. Sosialisasi dan promosi terkait dengan ketersediaan energi dan protein di tingkat rumah tangga;
3. Melengkapi sarana dan prasarana petugas pemantau harga;
4. Koordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas Infokom untuk mengadakan portal perkembangan harga pangan pada situs resmi atau portal Pemkab Lampung Barat sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan harga setiap hari;
5. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
6. Meningkatkan pembinaan, publikasi dan kampanye di berbagai media.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 20 Januari 2026

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



LEWATA DJUDIN AMRAN, M.M

Penyelia Utama Muda

NIP. 19661226 199203 1 001

Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	1.1	% Daerah Kerawanan Pangan	%	11,02	Triwulan 1	0	0	100	% Daerah Rawan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun.
						Triwulan 2	0	0	100	% Daerah Rawan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun.
						Triwulan 3	0	0	100	% Daerah Rawan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun.
						Triwulan 4	11,02	2,21%	498	Didasarkan hasil dari analisa Peta rawan pangan Kabupaten Lampung Barat Realisasi tercapai sangat baik, diatas target yang telah ditetapkan.
						Kondisi Akhir (F)		2,21	498	Didasarkan hasil dari analisa Peta rawan pangan Kabupaten Lampung Barat Realisasi tercapai sangat baik, diatas target yang telah ditetapkan.

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	1 Tercapai	
	> 100%	Melebihi Target

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1.1	Index Ketahanan Pangan	%	72.9	Triwulan 1	0	0	100	Index Ketahanan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun dan yang melaksanakan penghitungan adalah Bappanas
						Triwulan 2	0	0	100	Index Ketahanan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun dan yang melaksanakan penghitungan adalah Bappanas
						Triwulan 3	0	0	100	Index Ketahanan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun dan yang melaksanakan penghitungan adalah Bappanas
						Triwulan 4	72.9	77,15	105	Realisasi tercapai sangat baik, diatas target yang telah ditetapkan.
						Kondisi Akhir (F)		77,15	105	Realisasi tercapai sangat baik, diatas target yang telah ditetapkan.
2	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	2.1	% Daerah Kerawanan Pangan	%	11,02	Triwulan 1	0	0	100	% Daerah Rawan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun.
						Triwulan 2	0	0	100	% Daerah Rawan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun.
						Triwulan 3	0	0	100	% Daerah Rawan Pangan baru dapat dilaksanakan/dihitung pada akhir tahun.
						Triwulan 4	11,02	2,21%	498	Didasarkan hasil dari analisa Peta rawan pangan Kabupaten Lampung Barat Realisasi tercapai sangat baik, diatas target yang telah ditetapkan.
						Kondisi Akhir (F)		2,21	498	Didasarkan hasil dari analisa Peta rawan pangan Kabupaten Lampung Barat Realisasi tercapai sangat baik, diatas target yang telah ditetapkan.

Keterangan

Warna Prosentase

	n/a
	< 100%
	> 100%

Keterangan

- Tidak Ada Target
- Tidak Tercapai
- 1 Tercapai
- Melebihi Target

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1 : Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.607.000.00	800.000.00	3.25	3.877.000.00	15.76	6.168.000.00	25.07	24.351.000.00	98.96
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.189.000.00	400.000.00	2.08	1.068.000.00	5.57	2.049.000.00	10.68	18.933.000.00	98.67
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.335.000.00	0	0	1.025.000.00	76.78	1.335.000.00	100	1.335.000.00	100
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	404.000.00	0	0	150.000.00	37.13	240.000.00	59.41	404.000.00	100
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	360.000.00	0	0	0	0	235.000.00	65.28	360.000.00	100
		1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	227.000.00	0	0	227.000.00	100	227.000.00	100	227.000.00	100
		1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	507.000.00	0	0	507.000.00	100	507.000.00	100	507.000.00	100
		1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.585.000.00	400.000.00	15.47	900.000.00	34.82	1.575.000.00	60.93	2.585.000.00	100
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.096.571.791.00	542.996.698.00	25.9	1.081.963.491.00	51.61	1.519.726.978.00	72.49	2.025.932.052.00	96.63
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.093.723.791.00	542.996.698.00	25.93	1.081.963.491.00	51.68	1.518.495.978.00	72.53	2.023.084.052.00	96.63
		1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.285.000.00	0	0	0	0	0	0	1.285.000.00	100
		1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD	549.000.00	0	0	0	0	217.000.00	39.53	549.000.00	100

		1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.014.000.00	0	0	0	0	1.014.000.00	100	1.014.000.00	100
	1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.053.400.00	0	0	228.400.00	21.68	1.053.400.00	100	1.053.400.00	100
		1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	505.000.00	0	0	100.000.00	19.8	505.000.00	100	505.000.00	100
		1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	548.400.00	0	0	128.400.00	23.41	548.400.00	100	548.400.00	100
	1.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.355.000.00	0	0	400.000.00	29.52	1.355.000.00	100	1.355.000.00	100
		1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.355.000.00	0	0	400.000.00	29.52	1.355.000.00	100	1.355.000.00	100
	1.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.106.500.00	5.688.352.00	5.98	41.126.352.00	43.24	64.836.846.00	68.17	94.198.521.00	99.05
		1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.050.500.00	1.000.000.00	16.53	2.000.000.00	33.06	6.050.500.00	100	6.050.500.00	100
		1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.594.000.00	0	0	2.146.000.00	38.36	5.589.000.00	99.91	5.589.000.00	99.91
		1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.925.000.00	500.000.00	7.22	2.500.000.00	36.1	6.425.000.00	92.78	6.925.000.00	100
		1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.080.000.00	0	0	5.040.000.00	50	7.560.000.00	75	10.080.000.00	100
		1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.280.000.00	0	0	2.880.000.00	54.55	4.020.000.00	76.14	5.280.000.00	100
		1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.577.000.00	4.188.352.00	10.58	5.160.352.00	13.04	13.792.346.00	34.85	38.874.021.00	98.22
		1.5.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.600.000.00	0	0	21.400.000.00	99.07	21.400.000.00	99.07	21.400.000.00	99.07
	1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.030.400.00	7.985.387.00	11.57	27.141.486.00	39.32	40.298.358.00	58.38	59.627.350.00	86.38
		1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000.00	0	0	1.000.000.00	40	1.900.000.00	76	2.500.000.00	100

		1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000.00	3.156.187.00	16.97	6.502.286.00	34.96	9.786.158.00	52.61	13.096.950.00	70.41
		1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.930.400.00	4.829.200.00	10.08	19.639.200.00	40.97	28.612.200.00	59.7	44.030.400.00	91.86
	1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	77.352.400.00	8.586.000.00	11.1	48.999.900.00	63.35	59.102.400.00	76.41	74.159.102.00	95.87
		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.150.000.00	8.586.000.00	16.46	27.487.500.00	52.71	35.400.000.00	67.88	48.956.702.00	93.88
		1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.190.000.00	0	0	1.500.000.00	28.9	3.690.000.00	71.1	5.190.000.00	100
		1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.012.400.00	0	0	20.012.400.00	100	20.012.400.00	100	20.012.400.00	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN											
	2.1		Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	74.893.000.00	0	0	3.211.000.00	4.29	8.100.000.00	10.82	74.654.500.00	99.68
		2.1.1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	43.675.000.00	0	0	1.025.000.00	2.35	1.025.000.00	2.35	43.675.000.00	100
		2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	31.218.000.00	0	0	2.186.000.00	7	7.075.000.00	22.66	30.979.500.00	99.24
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											
	3.1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	207.302.800.00	0	0	20.441.575.00	9.86	110.611.825.00	53.36	202.046.875.00	97.46
		3.1.1	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	155.000.000.00	0	0	3.784.575.00	2.44	81.718.325.00	52.72	150.498.075.00	97.1
		3.1.2	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	12.983.000.00	0	0	607.500.00	4.68	3.378.000.00	26.02	12.606.000.00	97.1

		3.1.3	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	30.408.500.00	0	0	14.188.500.00	46.66	22.420.500.00	73.73	30.408.500.00	100
		3.1.4	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	8.911.300.00	0	0	1.861.000.00	20.88	3.095.000.00	34.73	8.534.300.00	95.77
		3.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	174.098.000.00	0	0	71.821.152.00	41.25	154.993.529.00	89.03	173.833.529.00	99.85
		3.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	174.098.000.00	0	0	71.821.152.00	41.25	154.993.529.00	89.03	173.833.529.00	99.85
		3.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	119.851.000.00	0	0	20.708.100.00	17.28	83.311.775.00	69.51	119.119.775.00	99.39
		3.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	31.476.000.00	0	0	0	0	3.041.000.00	9.66	30.884.000.00	98.12
		3.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	88.375.000.00	0	0	20.708.100.00	23.43	80.270.775.00	90.83	88.235.775.00	99.84
4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
		4.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	12.493.000.00	0	0	921.000.00	7.37	6.159.000.00	49.3	12.481.000.00	99.9
		4.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	12.493.000.00	0	0	921.000.00	7.37	6.159.000.00	49.3	12.481.000.00	99.9
5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
		5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	23.495.000.00	0	0	2.606.000.00	11.09	5.026.000.00	21.39	23.224.439.00	98.85
		5.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	23.495.000.00	0	0	2.606.000.00	11.09	5.026.000.00	21.39	23.224.439.00	98.85
Total Per Sasaran				2.977.209.291.00	566.056.437.00	19.01	1.323.445.456.00	44.45	2.060.743.111.00	69.22	2.886.036.543.00	96.94
Grand Total				2.977.209.291.00	566.056.437.00	19.01	1.323.445.456.00	44.45	2.060.743.111.00	69.22	2.886.036.543.00	96.94

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja :
Jabatan Pelapor :
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev :
Jabatan Pimpinan Pelapor :

: Ir. NATA DJUDIN AMRAN.M.M.
: KEPALA DINAS
: Parosil Mabsus
: Bupati Lampung Barat

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Outcome / Hasil yang dicapai
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Index Ketahanan Pangan	%	72.9	77,15	105.00					Realisasi tercapai sangat baik, diatas target yang telah ditetapkan.
2	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Kerawanan Pangan	%	11,02	2,21%	498.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.365.076.491	2.280.676.425	96.43	Didasarkan hasil dari analisa Peta rawan pangan Kabupaten Lampung Barat Realisasi tercapai sangat baik, diatas target yang telah ditetapkan.
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	74.893.000	74.654.500	99.68	
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	501.251.800	495.000.179	98.75	
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	12.493.000	12.481.000	99.90	
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	23.495.000	23.224.439	98.85	

2. Terlaksananya Pengawasan Mutu pangan segar asal tumbuhan sampai tingkat petani;
3. Sosialisasi/pembinaan/pelatihan ke kelompok kelompok tani;
4. Meningkatkan kinerja dan disiplin seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

1. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
2. Peningkatan akses jalan;
3. Penyediaan tenaga kesehatan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

--

	Lampung Barat, 20 Januari 2026 KEPALA DINAS  I. NARA DJUBIN AMRAN.M.M. 396012261992031001
--	---

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: ERWIENSYAH HUSIEN, S.H, M.H
: SEKRETARIS
: Ir. NATA DJUDIN AMRAN.M.M.
: KEPALA DINAS

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Program	Indikator Program / Outcome / Hasil	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Outcome / Hasil yang dicapai
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	%	80	86,11	107.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.365.076.491	2.280.676.425	96.43	Realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan.

B. FAKTOR PENDUKUNG

Faktor Pendukung sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya kinerja dan disiplin seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
3. Keselarasan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan pangan dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

 Kepala Dinas Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 20 Januari 2026 IR. NATA DJUDIN AMRAN.M.M. 26612261992031001	Lampung Barat, 20 Januari 2026 ERWIENSYAH HUSIEN, S.H, M.H 197907132009021001
--	---

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MUHLATIP, S.H, M.M
: KABID KETERSEDIAAN, CADANGAN DAN KERAWANAN PANGAN
: Ir. NATA DJUDIN AMRAN.M.M.
: KEPALA DINAS

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Program	Indikator Program / Outcome / Hasil	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Outcome / Hasil yang dicapai
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/ka/hr	2400	3.933	164.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	74.893.000	74.654.500	99.68	Total ketersediaan energi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mencapai 3.933 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kalori/kapita/hari, Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal pangan nabati yaitu sebesar 3.611 kalori/kapita/hari dan sisanya berasal dari pangan hewani yaitu sebesar 323 kalori/kapita/hari
		Angka Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	69	95,74	139.00		74.893.000	74.654.500	99.68	Total ketersediaan protein adalah sebesar 95,74 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa Rawanan pangan	Pekon	2	2	100.00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	12.493.000	12.481.000	99.90	Realisasi tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

2. Meningkatnya kinerja dan disiplin seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
3. Menjadikan perjanjian kinerja pada tiap tiap Jabatan sebagai dasar pelaksanaan tugas pada masing masing Pegawai;
4. Menjalin Kerjasama antar Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

1. Menjadikan perjanjian kinerja pada tiap tiap Jabatan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan memahami akan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Menjalin Kerjasama antar Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
3. Koordinasi dengan OPD terkait, seperti contohnya dengan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 20 Januari 2026



KEPALA DINAS

Jr. NATA DJUDIN AMRAN, M.M.
196612261992031001

Lampung Barat, 20 Januari 2026

KABID KETERSEDIAAN, CADANGAN DAN KERAWANAN PANGAN

MUHLATIP, S.H., M.M.
197207102000031013

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: RIZA FAHLEPI, SP
: ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH
: ERWIENSYAH HUSIEN, S.H, M.H
: SEKRETARIS

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Output / Keluaran yang dicapai
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	22	100.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.093.723.791	2.023.084.052	96.63	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.285.000	1.285.000	100.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	549.000	549.000	100.00	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	100.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1.014.000	1.014.000	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN



20 Januari 2026

Lampung Barat, 20 Januari 2026
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

RIZA FAHLEPI, SP
197305252006041003

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: KELANA INDAH SUSILAWATI, S.HUT. MP
: KABID KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN, MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
: Ir. NATA DJUDIN AMRAN.M.M.
: KEPALA DINAS

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Program	Indikator Program / Outcome / Hasil	Batuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Outcome / Hasil yang dicapai
1	PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Shor FPH Konsumsi	Point	84.6	88,72	104.00	PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	501.251.800	495.000.179	98.75	Nilai ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan telah mencapai tingkat yang relatif baik, mendekati skor ideal atau target nasional
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	%	> 80	97,87	100.00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	23.495.000	23.224.439	98.85	Realisasi tercapai sesuai target yaitu diatas 80%

B. FAKTOR PENDUKUNG

1. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan program/kegiatan berkaitan dengan Perangkat Daerah terkait;
 2. Meningkatkan kinerja dan disiplin seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
 3. Menjadikan perjanjian kinerja pada tiap tiap Jabatan sebagai dasar pelaksanaan tugas pada masing masing Pegawai;
 4. Menjalin Kerjasama antar Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.
-
1. Menjadikan perjanjian kinerja pada tiap tiap Jabatan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan memahami akan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. Menjalin Kerjasama antar Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
 3. Koordinasi dengan OPD terkait, seperti contohnya dengan PT Sarawanti Indo Genetech (SIG Laboratory), layanan uji dan analisis untuk keamanan pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

 Kepala Dinas Ir. NATA DJUDIN AMRAN.M.M. 196612261992031001	Lampung Barat, 20 Januari 2026 KABID KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN, MUTU DAN KEAMANAN PANGAN  KELANA INDAH SUSILAWATI, S.HUT. MP 197806032002122002
--	--

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: YOSTA SASTA BUDI SANDI, S.E
: KABID DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN PANGAN
: Ir. NATA DJUDIN AMRAN.M.M.
: KEPALA DINAS

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Program	Indikator Program / Outcome / Hasil	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Outcome / Hasil yang dicapai
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	Point	84.5	88,72	104.00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	501.251.800	495.000.179	98.75	Nilai ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan telah mencapai tingkat yang relatif baik, mendekati skor ideal atau target nasional

B. FAKTOR PENDUKUNG

1. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan program/kegiatan berkaitan dengan Perangkat Daerah terkait;
2. Meningkatkan kinerja dan disiplin seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
3. Menjadikan perjanjian kinerja pada tiap tiap Jabatan sebagai dasar pelaksanaan tugas pada masing masing Pegawai;
4. Menjalin Kerjasama antar Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

Telah diteliti dan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal <u>20 Januari 2026</u> KEPALA DINAS Ir. NATA DJUDIN AMRAN.M.M. 196612261973011001	Lampung Barat, <u>20 Januari 2026</u> KABID DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN PANGAN YOSTA SASTA BUDI SANDI, S.E 197708242006041002
---	---



**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: HARIYATI, S.IP
: KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN
: ERWIENSYAH HUSIEN, S.H, M.H
: SEKRETARIS

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

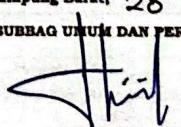
No	Kinerja						Keuangan				
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Output / Keluaran yang dicapai
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	11	11	100.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.189.000	18.933.000	98.67	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.335.000	1.335.000	100.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	404.000	404.000	100.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	360.000	360.000	100.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	227.000	227.000	100.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	507.000	507.000	100.00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.585.000	2.585.000	100.00	
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	100.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	505.000	505.000	100.00	
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	548.400	548.400	100.00	
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	12	100.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.355.000	1.355.000	100.00	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.050.500	6.050.500	100.00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.594.000	5.589.000	99.91	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.925.000	6.925.000	100.00	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	100.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.080.000	10.080.000	100.00	

	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Notasi / penjelasan tentang Output / Keluaran yang dicapai
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.280.000	5.280.000	100.00	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.577.000	38.874.021	98.22	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100.00	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	13.096.950	70.41	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	100.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.150.000	48.956.702	93.88	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	100.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.190.000	5.190.000	100.00	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	100.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.012.400	20.012.400	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

[illegible]

D. REKOMENDASI PIMPINAN

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 20 Januari 2024  PROVINSI LAMPUNG DINAS KETAHANAN LAMPUNG BARAT	Lampung Barat, 20 Januari 2024 KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN  HARIYATI, S.IP 197808082007012013
--	--

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAJAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: NEVI TENSILIA, S.TP
: PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
: MUHLATIP, S.H, M.M
: KABID KETERSEDIAAN, CADANGAN DAN KERAWANAN PANGAN

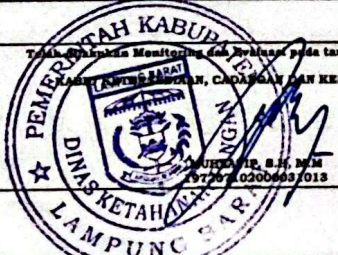
A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Output / Keluaran yang dicapai
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	5	5	100.00	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	43.675.000	43.675.000	100.00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	2	2	100.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	31.218.000	30.979.500	99.24	
3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	5	5	100.00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	174.098.000	173.833.529	99.85	
4	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	1	1	100.00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	12.493.000	12.481.000	99.90	

B. FAKTOR PENDUKUNG

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

 Teknik Penyusunan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 20 Januari 2026 KABID KETERSEDIAAN, CADANGAN DAN KERAWANAN PANGAN	Lampung Barat, 20 Januari 2026 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN NEVI TENSILIA, S.TP 198611242011012002
---	---

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SALAMAH, S.IP
: ANALIS KETAHANAN PANGAN
: YOSTA SASTA BUDI SANDI, S.E
: KABID DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN PANGAN

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Output / Keluaran yang dicapai
1	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100.00	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	155.000.000	150.498.075	97.10	
2	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	dokumen	12	12	100.00	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	30.408.500	30.408.500	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN



Lampung Barat, 20 Januari 2026
KABID DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN PANGAN

YOSTA SASTA BUDI SANDI, S.E
197708242006041002

Lampung Barat, 20 Januari 2026
ANALIS KETAHANAN PANGAN

SALAMAH, S.IP
197207191194012004

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: FITRIATI, S.IP
: ANALIS KETAHANAN PANGAN
: YOSTA SASTA BUDI SANDI, S.E
: KABID DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN PANGAN

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

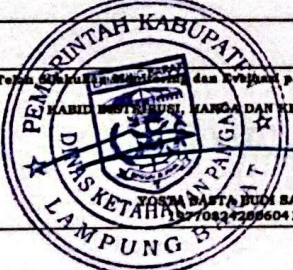
No	Kinerja						Keuangan				
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Output / Keluaran yang dicapai
1	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	dokumen	12	12	100.00	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12.983.000	12.606.000	97.10	
2	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1	1	100.00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	8.911.300	8.534.300	95.77	

B. FAKTOR PENDUKUNG

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

Teknik Pengukuran, Pengukuran dan Evaluasi pada tanggal 20 Januari 2026
KABID DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN PANGAN
YOSTA SASTA BUDI SANDI, S.E
197806112009022004



Lampung Barat, 20 Januari 2026
ANALIS KETAHANAN PANGAN
FITRIATI, S.IP
197806112009022004



**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: NAPRIL HUDA, S.IP
: ANALIS KETAHANAN PANGAN
: KELANA INDAH SUSILAWATI, S.HUT. MP
: KABID KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN, MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Output / Keluaran yang dicapai
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dekumen	1	1	100.00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	31.476.000	30.884.000	98.12	

B. FAKTOR PENDUKUNG

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

Telah diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lampung Barat tanggal 20 Januari 2026
KABID KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN, MUTU DAN KEAMANAN PANGAN



KELANA INDAH SUSILAWATI, S.HUT. MP
197806032002122002

Lampung Barat, 20 Januari 2026
ANALIS KETAHANAN PANGAN

NAPRIL HUDA, S.IP
197906182007011007

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2025**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: HERLINA, SE
: PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
: KELANA INDAH SUSILAWATI, S.HUT. MP
: KABID KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN, MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -4

No	Kinerja						Keuangan				
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan / Penjelasan tentang Output / Kinerja yang dicapai
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4	4	100.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	88.375.000	88.235.775	99.94	
2	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100.00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	23.495.000	23.224.439	98.85	

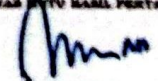
B. FAKTOR PENDUKUNG

C. FAKTOR PENGHAMBAT

D. REKOMENDASI PIMPINAN

Telah dituntaskan dan ditandatangani pada tanggal **20 Januari 2026**
KABID KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN, MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

KELANA INDAH SUSILAWATI, S.HUT. MP
09760031002120002

Lampung Barat, **20 Januari 2026**
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

HERLINA, SE
10760022830000120000